

**ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT SUKU AKIT
DALAM KEGIATAN PEMBANGUNAN
DESA TELUK PAMBANG KECAMATAN BANTAN
KABUPATEN BENGKALIS**

SKRIPSI

OLEH



NUR AZIKIN
NIM : 10875004373



**PROGRAM SI
JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA**

**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
2013**

ABSTRAK

ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT SUKU AKIT DALAM KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA TELUK PAMBANG KECAMATAN BANTAN KABUPATEN BENGKALIS

OLEH

NUR AZIKIN
NIM. 10875004373

Partisipasi merupakan bentuk keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat dengan sadar dalam suatu program atau kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaannya partisipasi masyarakat dapat digolongkan sebagai partisipasi berupa dana (barang atau benda), partisipasi berupa tenaga (fisik), partisipasi berupa keahlian (keterampilan). Otonomi daerah diharapkan mampu memberdayakan masyarakat didasarkan atas sudut pandang aksi sosial dan pengaruh organisasi sosial dengan cara melibatkan masyarakat dalam sharing informasi, merumuskan tujuan, mensetting kebijakan, mengalokasikan sumber-sumber pendanaan, mengoperasikan program, serta mendistribusikan manfaat yang diperoleh, dengan kata lain, melibatkan masyarakat sejak tahap perencanaan hingga implementasi dan pemerataan hasil hasilnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat suku akit serta faktor-faktor apa yang menghambat partisipasi dalam mendukung kegiatan pembangunan di Desa Teluk Pambang. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data penulis lakukan dengan observasi, interview dan kuisioner, kemudian analisis data penulis lakukan terdiri dua kelompok. Data kualitatif diberi gambaran dalam bentuk kata atau kalimat. Sedangkan data kuantitatif dalam bentuk angka-angka yang di persentasekan. Data kualitatif selanjutnya ditranspormasikan dalam bentuk kata-kata setelah mendapat hasil ahir akan dikuantitatifkan kembali. Penarikan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan rumus slovin. Hasil dari penelitian ini adalah ditemukan ada beberapa faktor-faktor yang menghambat partisipasi yaitu faktor ekonomi, faktor pendidikan serta faktor sosial dan budaya masyarakat suku akit yang masih tergolong rendah. Namun, secara keseluruhan berdasarkan sumber data yang didapatkan peneliti menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat suku akit desa teluk pambang dengan persentase responden sebesar 70 % dinyatakan (Baik).

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb

Alhamdulillah, puji syukur yang tiada hentinya kehadiran Allah SWT atas berkah, rahmat dan hidayah-Nya penelitian ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya sesuai dengan kemampuan yang ada pada penulis. Shalawat serta salam tidak lupa kita ucapkan untuk Sang Baginda Rasul Nabi Besar Muhammad SAW. Semoga kita termasuk orang-orang mendapat syafaat beliau dihari kelak dan tergolong pada orang-orang ahli syurga. Amin ya robbal 'alamin.

Penelitian ini berjudul “ **ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT SUKU AKIT DALAM KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA TELUK PAMBANG KECAMATAN BANTAN KABUPATEN BENGKALIS**”. Disusun dalam rangka memenuhi persyaratan akademis untuk menyelesaikan pendidikan mencapai gelar Sarjana Strata I (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penelitian ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak yang telah diberikan kepada penulis. Oleh karena itu perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Keluarga tersayang, Ayahanda Burhan dan Ibunda Azizah serta Kakanda Mulandari tercinta. Kakek H. Taslim (Alm) dan Nenek Hj. Paisah (Alm). Bapak H. Abdurrahman beserta Ibu Marsini Sekeluarga, Bapak Abdullah beserta Ibu Alawiyah Sekeluarga, Bapak Bakhtiar beserta Ibu Nurleha

Sekeluarga, Kak Anjan, Bang Makhrus, Kak Hapipah, Kak Rubi, Kak yeyen, Kak Fitra (Sekeluarga), Mhd. Azwam, Tika, Elsa (Sepupu), Andri Putra, Eris, Zakry (Ponakan), yang telah berjasa besar, bekerja keras memberikan dorongan serta do'a untuk keberhasilan penulis.

2. Bapak Rektor UIN SUSKA **Prof. Dr. H. M. Nazir** selaku pimpinan.
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Bapak **Dr. Mahendra Romus, SP, M. Ec**
4. Ketua Jurusan Administrasi Negara Bapak **Afrizal, S. Sos, M. Si**
5. Bapak **Drs. Alpizar, M.Si** sebagai dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, masukan serta arahan dalam menyelesaikan penelitian ini.
6. Bapak **Mashuri, MA** selaku Penasehat Akademis yang telah memberikan masukan dan arahan dalam menyelesaikan penelitian ini.
7. Terima kasih buat Bapak **Dr. H. Abd. Wahid, M.Us** selaku orang tua sekaligus Pembantu Dekan III Fakultas Ushuluddin UIN SUSKA Riau yang banyak memberikan semangat dan masukan dalam penulisan skripsi.
8. Terima kasih kepada seluruh staf dan dosen Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA Riau yang telah memberikan ilmu dan mendidik penulis selama mengikuti proses perkuliahan.
9. Terima kasih juga buat guru-guru, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu mulai dari SD, MDA, MTs, SLTA, yang telah banyak memberikan didikan dan ilmu sehingga penulis bisa seperti sekarang.

10. Terima kasih kepada teman-teman mahasiswa Program Studi Administrasi Negara angkatan 2008, dan sangat spesial buat teman-teman “Al Banbany dan Walet Timur FC”.

Atas segala kebaikan mereka, penulis banyak berhutang budi, hanya do’a yang dapat mengiringi ketulusan mereka, sehingga pengorbanan yang telah mereka berikan mendapat balasan yang lebih baik dari Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih banyak kekurangan, dikarenakan wawasan dan ilmu pengetahuan peneliti yang masih kurang “*tak ada gading yang tak retak*”. Untuk itu kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan penelitian ini. Akhirnya, penulis berharap semoga penelitian ini dapat diterima serta bermanfaat bagi kalangan masyarakat umumnya dan khususnya bagi seluruh disiplin ilmu pemerintahan terlepas dari semua kekurangannya. Wassalamualaikum Wr,Wb.

Pekanbaru, 22 Mei 2013

Penulis

NUR AZIKIN

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penulisan	11
E. Sistematika Penulisan	11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Otonomi Daerah	13
B. Otonomi Desa	17
C. Pembangunan Desa	19
D. Pengertian Partisipasi.....	21
E. Bentuk dan Tipe Partisipasi.....	28
F. Pengertian masyarakat.....	29
G. Defenisi Konsep	31
H. Konsep Operasional / Variabel.....	33

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi Waktu Penelitian	35
B. Jenis Data dan Sumber Data.....	35
C. Teknik Pengumpulan Data	35
D. Populasi dan Sample	36
E. Analisa Data.....	37

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Suku Akit/Asli Di Desa Teluk Pambang Kec. Bantan Kab. Bengkalis.....	38
B. Keadaan Georafis Desa Teluk Pambang Kec. Bantan Kab. Bengkalis.....	39
C. Jumlah Masyarakat Suku Akit/Asli Di Desa Teluk Pambang Kec. Bantan Kab. Bengkalis	40
D. Pendidikan	42
E. Agama	44
F. Mata Pencarian	45
G. Pemerintah Desa.....	46

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden.....	48
B. Partisipasi Masyarakat Suku Akit Dalam Mendukung Kegiatan Pembangunan Didesa Teluk Pambang.....	51
1. Partisipasi dalam Perencanaan Pembangunan	51
2. Partisipasi dalam Pelaksanaan Pembangunan.....	57
3. Partisipasi dalam Memanfaatkan dan Memelihara Hasil Pembangunan	62

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan	72
B. Saran	74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BIOGRAFI PENULLIS

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan desa sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, memiliki arti penting yang cukup strategis karena secara keseluruhan desa merupakan basis ketahanan nasional bagi wilayah Kesatuan Negara Republik Indonesia. Era reformasi dan Otonomi Daerah membawa dampak yang sangat luas terhadap berkembangnya demokrasi di Indonesia serta membawa harapan besar untuk kesejahteraan rakyat yang menjadi harapan baru bagi pemerintah dan masyarakat desa untuk membangun desanya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Didalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diamanatkan bahwa pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam hal ini, partisipasi masyarakat diyakini mampu memberdayakan masyarakat didasarkan atas sudut pandang aksi sosial dan pengaruh organisasi sosial. untuk memahami aset aset yang dimiliki guna mencapai keinginan, bagaimana mereka sejauh ini menangani permasalahannya, aktivitas serta sumberdaya lain apa yang dibutuhkan untuk memenuhi tujuan mereka, dan bagaimana keinginan mereka saat ini mampu meningkatkan kemampuannya dalam menciptakan masa depan.

Strategi pelaksanaan partisipasi dicapai dengan cara melibatkan masyarakat dalam sharing informasi, merumuskan tujuan, mensetting kebijakan, mengalokasikan sumber-sumber pendanaan, mengoperasikan program, serta mendistribusikan manfaat yang diperoleh, dengan kata lain, melibatkan masyarakat sejak tahap perencanaan hingga implementasi dan pemerataan hasil hasilnya. Partisipasi masyarakat merupakan konsekuensi dari suatu negara yang menganut sistem demokrasi yang berdasarkan pada Pancasila. Disamping itu juga diharapkan agar proses pembangunan desa dapat berjalan dengan lancar dan dapat menciptakan suatu legitimasi bagi sistem pembangunan desa yang efektif.

Seiring dengan terbukanya keran kebebasan dan demokrasi di Indonesia, kini mulai terjadi perubahan paradigma pembangunan. Pendekatan *Top Down* dimana segala sesuatunya diputuskan dari atas mulai ditinggalkan. Setiap kebijakan kini semakin mengakomodir suara masyarakat, sehingga pada gilirannya akan menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Salah satu yang menjadi masalah besar yang sering menjadi persoalan dalam masyarakat adalah kecenderungan individu-individu dalam masyarakat

mengabaikan hak yang dimiliki untuk sebuah kepentingan umum yang lebih tinggi. Pada umumnya masyarakat lebih mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan umum yang menyangkut kepentingan bersama. Adanya kesadaran yang rendah terhadap pentingnya menggunakan hak yang dimiliki mencerminkan ketidak pedulian individu-individu dalam masyarakat terhadap kehidupan masa depan seperti pembangunan Desa.

Untuk mewujudkan pembangunan yang lebih demokratis pemerintah pusat telah mengatur dalam UU RI No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dengan tujuan menciptakan pemerataan pembangunan nasional dalam mengatasi kesenjangan antar daerah, sebagai upaya untuk mendukung berjalannya roda pemerintahan hingga ke pelosok negeri.

Konsekuensi implementasi otonomi daerah yang diamanatkan dalam Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2004/Pasal 206/Bab XI/ tentang Pemerintahan Desa, disebutkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa sebagai berikut :

1. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa
2. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa
3. Tugas pemantauan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota
4. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa

Kemudian, dalam Perdes Desa Teluk Pambang Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis Tahun 2011 mengenai perencanaan pembangunan :

Pasal 2

- 1) Pembangunan Desa diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, berkelanjutan, berwawasan lingkungan serta kemandirian dengan menjaga kesinambungan kemajuan desa, daerah dan kesatuan Nasional.
- 2) Rencana Pembangunan Desa disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan.
- 3) Rencana pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan kepada pemilihan strategi dan program serta kegiatan yang tercantum di dalam dokumen perencanaan yang ada dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya yang tersedia.
- 4) Tata cara penyusunan dokumen rencana pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dilaksanakan dalam satu kesatuan perencanaan pembangunan desa.
- 5) Dalam rangka menyusun perencanaan pembangunan Desa harus memperhatikan asas umum penyelenggaraan pemerintahan meliputi:
 - a. asas kepastian hukum;
 - b. asas tertib penyelenggaraan;
 - c. asas kepentingan umum;
 - d. asas keterbukaan;

- e. asas proporsionalitas;
- f. asas akuntabilitas;
- g. asas efisiensi;
- h. asas efektifitas.

Pasal 3

- 1) Perencanaan Pembangunan Desa bertujuan untuk :
- 2) mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
- 3) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar pelaku pembangunan, antar ruang, antar waktu dan antar fungsi SKPD;
- 4) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran dan pengawasan;
- 5) mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
- 6) menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan sesuai dengan fungsi RTR Desa.

Pasal 4

Ruang lingkup Perencanaan Pembangunan Desa mencakup seluruh penyelenggaraan semua fungsi pemerintahan desa yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu sesuai dengan sumber daya dan penataan ruang wilayah yang ada dalam satu kesatuan wilayah Negara Republik Indonesia.

Merujuk pada Undang-undang di atas, jelas bahwaperan serta masyarakat dan partisipasinya dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan desa dari seluruh aspeknya, tidak akan dapat berjalan secara maksimal, bilamana

pemerintah desa (Kepala Desa) sebagai orang yang terdepan dengan memiliki kewenangan untuk menggerakkan masyarakat sebagai administrator pembangunan bersifat apatis terhadap kondisi masyarakatnya dan pemerintahannya, maka yang akan terjadi adalah kepakuman.

Partisipasi merupakan suatu elemen proses dalam pembangunan desa, dalam konsep perencanaan dan desain pembangunan wilayah, partisipasi dilihat sebagai persyaratan untuk mendukung proses demokratisasi. Semua anggota masyarakat memiliki hak yang sama untuk berperanserta dalam pengambilan keputusan yang menyangkut hidup dan penghidupannya. Dalam bentuknya yang ideal, partisipasi dalam perencanaan dan desain pembangunan wilayah bukan hanya merupakan hak, tetapi sudah merupakan suatu aksi demokratis. Partisipasi menjanjikan suatu proses yang bersifat kolaboratif dimana seluruh lapisan masyarakat dapat merumuskan tujuan bersama (*common goals*), terlibat di dalam pengambilan keputusan kolektif, menciptakan ruang, dimana ruang ini merupakan tempat untuk mengekspresikan keinginan mereka bersama.

Tabel 1.1. Pembangunan Fisik Desa Teluk Pambang Tahun 2011-2012

No	Tahun	Jenis Pembangunan	Terealisasi
1	2011	Pembangunan Jalan Beton Jl. Budi Luhur	98 %
2	2011	Pembangunan Sarana Air Bersih	100 %
3	2012	Pembangunan Pagar Rumah Ibadah	40 %
4	2012	Pembangunan Parit Beton	50 %
5	2012	Pembangunan Tempat Wudhu'	100 %
6	2012	Duiker 4 Unit	45 %
7	2012	Pembangunan Sarana Olahraga	50 %

Sumber Data : Kantor kepala desa teluk pambang tahun 2011-2012

Tabel 1.2. Data Swadaya Masyarakat Desa Teluk Pambang Tahun 2012

No	Tahun	Jenis Swadaya Masyarakat	Terealisasi
1	2012	Penanaman Hutan Mangrove	50 %
2	2012	Bantuan Jaring Kurau Para Nelayan	100 %
3	2012	Kolam Terpal Lele (Kelompok)	80 %

Sumber Data : Kantor kepala desa teluk pambang tahun 2012

Dari tabel diatas dapat diketahui data pembangunan fisik dan swadaya masyarakat yang diprogramkan oleh pemerintah Desa Teluk Pambang. Beberapa diantaranya dapat terealisasi dengan baik dan selebihnya masih dalam proses pembangunan. Dalam pelaksanaannya partisipasi masyarakat dapat digolongkan sebagai partisipasi berupa dana (*barang atau benda*), partisipasi berupa tenaga (*fisik*) serta partisipasi berupa keahlian (*keterampilan*) diharapkan mampu memberikan peran aktif untuk merealisasikan program-program pembangunan yang sudah diagendakan oleh pemerintah.

Tabel 1.3.
Menurut data profil Desa Teluk Pambang Kecamatan Bantan Kabupaten
Bengkalis Tahun 2010/2011 tentang jumlah etnis/suku sebagai berikut :

NO	Suku	Jumlah	
1	Jawa	3168	Orang
2	Melayu	1390	Orang
3	Cina	63	Orang
4	Batak	2	Orang
5	Bugis	5	Orang
6	Akit / Asli	825	Orang
Jumlah Keseluruhan		5453	Orang

Sumber Data : Kantor Desa Teluk Pambang, Tahun 2010/2011

Dari table 1.3 diatas tercatat begitu banyaknya jumlah penduduk suku asli/akit yang ada di Desa Teluk Pambang yaitu 825 Orang kemudian dibagi dalam satuan Kepala Keluarga yaitu berjumlah 165 KK, yang dikategorikan bisa ikut berpartisipasi dan seharusnya bisa menunjang kemajuan pembangunan di Desa Teluk Pambang.

Seperti yang diterangkan oleh latar belakang diatas bahwa semakin banyak masyarakat berpartisipasi semakin bagus kemajuan pembangunan disuatu desa tersebut. Dalam hal tersebut jelaslah lemahnya partisipasi masyarakat suku akit di Desa Teluk Pambang. Karena banyak masyarakat tetapi pembangunan hanya begitu-begitu saja tidak ada perubahan dari tahun-ketahun.

Selanjutnya pada bagian lain pengamatan penulis pada masyarakat suku akit di Desa Teluk Pambang Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis terlihat beberapa gejala yang mendukung untuk diadakannya suatu penelitian, yaitu:

1. Kurangnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan terutama partisipasi masyarakat melakukan gotong royong, karena masih ada pekerjaan lain yang lebih dipentingkan yaitu pemenuhan kebutuhan sehari-hari. (Dalam wawancara Februari 2013) kepada kepala Suku Akit, Kabit 41 Tahun yang merupakan kepala suku serta orang yang merangkai seluruh kehidupan suku akit yang berhubungan dengan urusan pemerintah.

” Menurutnya mayoritas dari masyarakat suku akit ini bekerja didaerah pinggiran sungai yaitu sebagai penebang kayu bakau, mencari siput, dan menangkap ikan, sehingga mereka jauh dari keramaian dan tidak sempat untuk memikirkan urusan-urusan tentang pembangunan desa”.

Tabel 1.2. Jadwal Gotong-Royong Masyarakat Suku Akit Desa Teluk Pambang

No	Bulan	Jadwal Gotong Royong	Jumlah Masyarakat yang Melaksanakan Gotong-Royong
1	Mei	11/2012	28 Orang
2	Juli	20/2012	21 Orang
3	Agustus	14/2012	41 Orang
4	Desember	03/2012	13 Orang

Sumber Data : RW 01 Sungai Raya Desa Teluk Pambang

2. Kemudian disusul dengan kurangnya partisipasi masyarakat dalam menghadiri rapat, masyarakat suku asli yang ikut rapat dalam kegiatan pembangunan di Desa Teluk Pambang hanya beberapa orang saja yaitu kerabat-kerabat dari kepala suku serta mereka yang masih peduli dengan budaya-budaya adat suku asli tersebut, biasanya mereka ini adalah golongan-golongan orang tua saja.

Menurut Kabit 41 tahun (kepala suku akit/asli) mengatakan :

“memang susah untuk mengajak masyarakat untuk rapat, apalagi setiap diadakan rapat banyak yang tidak hadir, menyebabkan warga yang lain malas untuk hadir”. Menurut Kibu (33) tahun dan Aking (25) tahun, “kita ini bukan orang yang berpendidikan, jadi tak perlu rasa nya menghadiri rapat cukuplah mereka yang mengerti saja”.

Tabel 1.3. Daftar Absen Masyarakat Suku Akit Desa Teluk Pambang

No	Bulan	Jadwal Rapat	Jumlah Masyarakat yang Hadir	Jumlah Masyarakat yang Diundang
1	Mei	05/2012	15 Orang	60 Orang
2	Agustus	08/2012	42 Orang	60 Orang
3	Desember	27/2012	20 Orang	60 Orang

Sumber Data : RW 01 Sungai Raya Desa Teluk Pambang

3. Permasalahan yang lain adalah kurangnya partisipasi masyarakat dalam memberikan bantuan berupa dana (iuran sosial). Menurut Kabit (41) tahun, *“pendapatan masyarakat suku asli ini hanya pas-pasan, istilah orang melayu kais pagi makan pagi, kais petang makan petang”*. Menurut Lemoy (39) tahun, *”Bagaimana bisa kami ikut iuran untuk makan aja kami susah”*.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Analisis Partisipasi Masyarakat Suku Akit Dalam Kegiatan Pembangunan Desa Teluk Pambang Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis”**.

B. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari pemaparan dan kenyataan di atas, maka permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: *“Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat partisipasi masyarakat suku akit dalam kegiatan pembangunan di Desa Teluk Pambang Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis?”*

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini meliputi:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tingkat Partisipasi Masyarakat suku akit dalam mendukung kegiatan pembangunan di Desa Teluk Pambang Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam kegiatan pembangunan di Desa Teluk Pambang Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis.

D. Manfaat Penulisan

Adapun manfaat penelitian ini yaitu:

1. Sebagai bahan masukan bagi pemerintahan Desa Teluk Pambang Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis dalam memberikan Partisipasi Pembangunan yang lebih berkala prioritas serta
2. Sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya dalam mengkaji permasalahan yang sama serta sebagai tambahan penulis dalam mengembangkan dan meningkatkan kemampuan berfikir melalui penulisan karya ilmiah serta melatih penulis menerapkan teori-teori yang didapat selama kuliah.

E. Sistematika Penulisan

Secara garis besar pembahasan dalam penulisan ini dibagi menjadi tiga pokok bahasan (BAB) dan masing-masing bab dibagi menjadi sub-sub, seperti berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah dan pokok-pokok bahasan, tujuan dan manfaat dari penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tentang pengertian Partisipasi masyarakat, pengertian pembangunan desa, faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Berisi tentang identifikasi variabel penelitian, definisi operasional, populasi dan metode pengambilan sampel, metode pengumpulan data, metode analisis instrumen serta metode analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang Geografi Desa Teluk Pambang, Demografi, Pemerintahan Desa Teluk Pambang.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Didalam Bab ini memuat hasil dari penelitian pembahasan yang dilakukan.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir, yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran yang diperlukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Otonomi Daerah

Secara etimologis otonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *Autos* dan *Nomos*. *Autos* berarti sendiri, dan *Nomos* berarti aturan. Jadi, otonomi bermakna kebebasan dan kemandirian daerah dalam menentukan langkah-langkah sendiri (Widarta, 2001:2).

Sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan definisi otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Daerah otonom adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus

urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2004/Bab IV/menyebutkan tentang hak dan kewajiban daerah adalah :

Pasal 21, dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai hak :

- a. Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya;
- b. Memilih pimpinan daerah;
- c. Mengelola aparatur daerah;
- d. Mengelola kekayaan daerah;
- e. Memungut pajak daerah dan retribusi daerah;
- f. Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada didaerah;
- g. Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah; dan
- h. Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 22, dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai kewajiban :

- a. Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Meningkatkan kehidupan demokrasi;
- c. Mengembangkan kualitas kehidupan masyarakat;
- d. Mewujudkan keadilan dan pemerataan;
- e. Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan;

- f. Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan;
- g. Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak;
- h. Mengembangkan sistem jaminan sosial;
- i. Menyusun perencanaan dan tata ruang daerah;
- j. Mengembangkan sumber daya produktif di daerah;
- k. Melestarikan lingkungan hidup;
- l. Mengelola administrasi kependudukan;
- m. Melestarikan nilai sosial budaya;
- n. Membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangan; dan
- o. Kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 23,

- (1) Hak dan kewajiban daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dan pasal 22 diwujudkan dalam bentuk rencana kerja pemerintahan daerah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang dikelola dalam system pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara efisien, efektif, transparan, akuntabel, tertib, adil, patuh dan taat pada peraturan perundang-undangan.

Terdapat dua nilai dasar yang dikembangkan dalam UUD 1945 berkenaan dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia, yaitu :

- 1) Nilai Unitaris, yang diwujudkan dalam pandangan bahwa Indonesia tidak mempunyai kesatuan pemerintahan lain di dalamnya yang bersifat Negara

(“Eenheidstaat”), yang berarti kedaulatan yang melekat pada rakyat, bangsa dan Negara Republik Indonesia tidak akan terbagi diantara kesatuan-kesatuan pemerintahan; dan

- 2) Nilai Dasar Desentralisasi Teritorial, dari isi dan jiwa pasal 18 Undang-undang Dasar 1945 beserta penjelasannya sebagaimana tersebut diatas maka jelaslah bahwa pemerintah diwajibkan untuk melaksanakan politik desentralisasi dan dekonsentrasi dibidang ketata negaraan.

Penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Selain itu penyelenggaraan otonomi daerah juga harus menjamin keserasian hubungan antara daerah dengan daerah lainnya, artinya mampu membangun kerjasama antar daerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar daerah. Hal yang tidak kalah pentingnya bahwa otonomi daerah juga harus mampu menjamin hubungan yang serasi antar daerah dengan pemerintah, artinya harus mampu memelihara dan menjaga keutuhan wilayah negara dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan negara.

Dengan demikian isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya. Adapun yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggungjawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional

B. Otonomi Desa

Desa berdasarkan Undang-undang RI No. 32 Tahun 2004 adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yuridiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem pemerintahan Nasional dan berada di kabupaten/kota, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi desa, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat (Nurhidayat, 2005:90).

Otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat dan utuh serta bukan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah harus menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut (Widjaja, 2005:165).

Dalam UU RI No. 32 Tahun 2004/Bab XI/Tentang Desa menjelaskan:

Pasal 200

- (1) Dalam pemerintahan daerah kabupaten/kota dibentuk pemerintahan desa yang terdiri dari pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa.
- (2) Pembentukan, penghapusan, dan/atau penggabungan Desa dengan memperhatikan asal-usulnya atau prakarsa masyarakat.

- (3) Desa di kabupaten/kota secara bertahap dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi kelurahan sesuai usul dan prakarsa pemerintah desa bersama badan permusyawaratan desa yang ditetapkan dengan perda.

Pasal 206

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa, yakni:

- a. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa;
- b. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa;
- c. tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota;
- d. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundangundangan diserahkan kepada desa.

Pasal 209

Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Pasal 215

- (1) Pembangunan kawasan pedesaan yang dilakukan oleh kabupaten/kota dan atau pihak ketiga mengikutsertakan pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan perda, dengan memperhatikan :
- a. Kepentingan masyarakat desa;
 - b. Kewenangan desa;

- c. Kelancaran pelaksanaan investasi;
- d. Kelestarian lingkungan hidup;
- e. Keserasian kepentingan antarkawasan dan kepentingan umum.

Undang-undang ini mengakui otonomi yang dimiliki oleh desa ataupun dengan sebutan lainnya dan kepada desa melalui pemerintah desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah atau pemerintah daerah untuk melaksanakan tugas tertentu. Sedang terhadap desa diluar desa geneologis yaitu desa yang bersifat administratif seperti desa yang dibentuk karena pemekaran desa ataupun karena transmigrasi ataupun karena alasan lain yang warganya pluralisatis, majemuk, dan heterogen, maka otonomi desa akan diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan dari desa itu sendiri (Nurhidayat, 2005:90).

C. Pembangunan Desa

Mengenai Istilah pembangunan, para ahli memberikan definisi yang beda-beda. Namun secara umum ada suatu kesepakatan bahwa pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan kearah yang lebih baik.

Berikut beberapa batasan dari para ahli yang dapat menggambarkan bahwa pengertian pembangunan ternyata banyak diambil dari sudut pandang yang berlainan antara lain :

Menurut Sufian Hamin (2003: 56) pembangunan adalah suatu kegiatan atau usaha secara sadar, terencana serta berkelanjutan untuk merubah dari suatu kondisi yang lebih baik.

Menurut Afiffudin (2010:42) pembangunan dapat diartikan dalam lima arti yaitu perubahan, pertumbuhan, rangkaian usaha yang secara sadar dilakukan, rencana yang tersusun secara rapi, dan cita-cita akhir dari perjuangan Negara atau bangsa.

Sedangkan menurut Nugroho (2033:67) pembangunan merupakan sebuah kegiatan yang kolosal, memakan waktu yang panjang, melibatkan seluruh warga Negara dan dunia internasional dengan menyerap hampir seluruh sumber daya negara dan bangsa.

Sondang P. Siagian (2001: 4) mengatakan bahwa pembangunan mengandung aspek yang sangat luas mencakup:

1. Pembangunan dibidang politik
2. Pembangunan dibidang ekonomi
3. Pembangunan dibidang sosial budaya
4. Pembangunan dibidang pertahanan dan keamanan.

Dalam Undang-undang RI No. 32 Tahun 2004

Dengan demikian, proses pembangunan terjadi di semua aspek kehidupan masyarakat, ekonomi, sosial, budaya, politik, yang berlangsung pada level makro (nasional) dan mikro (*commuinity/group*). Makna penting dari pembangunan adalah adanya kemajuan/perbaikan (*progress*), pertumbuhan dan diversifikasi.

Sebagaimana dikemukakan oleh para ahli di atas, *pembangunan* adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana. Sedangkan *perkembangan* adalah proses perubahan yang terjadi

secara alami sebagai dampak dari adanya pembangunan (Brata kusuma, 2005:23).

Semakin meningkatnya kompleksitas kehidupan masyarakat yang menyangkut berbagai aspek, pemikiran tentang modernisasi pun tidak lagi hanya mencakup bidang ekonomi dan industri, melainkan telah merambah ke seluruh aspek yang dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, modernisasi diartikan *sebagai proses transformasi dan perubahan dalam masyarakat yang meliputi segala aspeknya, baik ekonomi, industri, sosial, budaya, dan sebagainya.*

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pada dasarnya pembangunan tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan, dalam arti bahwa pembangunan dapat menyebabkan terjadinya pertumbuhan dan pertumbuhan akan terjadi sebagai akibat adanya pembangunan. Dalam hal ini pertumbuhan dapat berupa pengembangan/perluasan (*expansion*) atau peningkatan (*improvement*) dari aktivitas yang dilakukan oleh suatu komunitas masyarakat.

D. Pengertian Partisipasi

Secara etimologis, kata partisipasi adalah merupakan padanan dari kata *participatie* (Bahasa Belanda), atau *participation* (Bahasa Inggris) yaitu bagian atau ikut serta. Dalam Buku (Sundria Munawar, 2006 : 47) menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dengan sadar dalam suatu program atau kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaannya partisipasi masyarakat dapat digolongkan sebagai partisipasi

berupa dana (*barang atau benda*), partisipasi berupa tenaga (*fisik*), partisipasi berupa keahlian (*keterampilan*).

Sundria Munawar (2006 : 49) juga mengatakan bahwa pelaksanaan pembangunan dalam prakteknya mengandung pengertian :

1. Keterlibatan dalam proses perencanaan. Hal ini berarti bahwa perencanaan harus peka terhadap kepentingan masyarakat, sehingga dapat mendukung dalam pelaksanaan.
2. Keterlibatan dalam kegiatan pelaksanaan kegiatan pembangunan.
3. Keterlibatan dalam memetik hasil atau memanfaatkan hasil pembangunan.

Kata partisipasi sering dikaitkan dengan kegiatan-kegiatan yang bernuansa pembangunan, pengambilan keputusan, kebijakan, pelayanan pemerintah. Sehingga partisipasi memiliki arti yang sangat penting dalam kegiatan pembangunan, dimana pembangunan itu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan masyarakat.

Pemahaman konsep partisipasi dalam banyak hal sering diartikan secara sederhana sebagai peran serta dalam suatu lingkungan kegiatan. Tujuan dari partisipasi masyarakat adalah untuk mempertemukan seluruh kepentingan yang sama dan berbeda dalam suatu proses perumusan dan penempatan kebijakan (keputusan) secara profesional untuk semua pihak yang terlibat dan terpengaruh oleh kebijakan yang akan ditetapkan didalamnya.

Mikkelsen (1999: 64) membagi partisipasi menjadi 6 (enam) pengertian, yaitu:

1. Partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan;

2. Partisipasi adalah “pemekaan” (membuat peka) pihak masyarakat untuk meningkatkan kemauan menerima dan kemampuan untuk menanggapi proyek-proyek pembangunan;
3. Partisipasi adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukannya sendiri;
4. Partisipasi adalah suatu proses yang aktif, yang mengandung arti bahwa orang atau kelompok yang terkait, mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan hal itu;
5. Partisipasi adalah pemantapan dialog antara masyarakat setempat dengan para staf yang melakukan persiapan, pelaksanaan, monitoring proyek, agar supaya memperoleh informasi mengenai konteks lokal, dan dampak-dampak sosial;
6. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan, dan lingkungan mereka.

Dari penjelasan pakar yang mengungkapkan definisi partisipasi di atas dapat dibuat kesimpulan bahwa partisipasi masyarakat adalah keterlibatan aktif dari seseorang, atau sekelompok orang (masyarakat) secara sadar untuk berkontribusi secara sukarela dalam program pembangunan dan terlibat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring sampai pada tahap evaluasi.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan menjadi hal yang sangat penting ketika diletakkan diatas keyakinan bahwa masyarakatlah yang paling penting tahu apa yang menjadi kebutuhan dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat.

Pentingnya partisipasi dikemukakan oleh Conyers (1991: 154-155) sebagai berikut: *pertama*, partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal; *kedua*, bahwa masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk-beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut; *ketiga*, bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri.

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam suatu program, sifat faktor-faktor tersebut dapat mendukung suatu keberhasilan program namun ada juga yang sifatnya dapat menghambat keberhasilan program. Misalnya saja faktor usia, terbatasnya harta benda, pendidikan, pekerjaan dan penghasilan.

Angell (dalam Arniati, 1967: 130) mengatakan partisipasi yang tumbuh dalam masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan seseorang dalam berpartisipasi, yaitu:

1. Usia

Faktor usia merupakan faktor yang mempengaruhi sikap seseorang terhadap kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang ada. Mereka dari kelompok usia menengah ke atas dengan keterikatan moral kepada nilai

dan norma masyarakat yang lebih mantap, cenderung lebih banyak yang berpartisipasi dari pada mereka yang dari kelompok usia lainnya.

2. Jenis kelamin

Nilai yang cukup lama dominan dalam kultur berbagai bangsa mengatakan bahwa pada dasarnya tempat perempuan adalah “di dapur” yang berarti bahwa dalam banyak masyarakat peranan perempuan yang terutama adalah mengurus rumah tangga, akan tetapi semakin lama nilai peran perempuan tersebut telah bergeser dengan adanya gerakan emansipasi dan pendidikan perempuan yang semakin baik.

3. Pendidikan

Dikatakan sebagai salah satu syarat mutlak untuk berpartisipasi. Pendidikan dianggap dapat mempengaruhi sikap hidup seseorang terhadap lingkungannya, suatu sikap yang diperlukan bagi peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat.

4. Pekerjaan dan penghasilan

Hal ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena pekerjaan seseorang akan menentukan berapa penghasilan yang akan diperolehnya. Pekerjaan dan penghasilan yang baik dan mencukupi kebutuhan sehari-hari dapat mendorong seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan masyarakat. Pengertiannya bahwa untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan, harus didukung oleh suasana yang mapan perekonomian.

5. Lamanya tinggal

Lamanya seseorang tinggal dalam lingkungan tertentu dan pengalamannya berinteraksi dengan lingkungan tersebut akan berpengaruh pada partisipasi seseorang. Semakin lama ia tinggal dalam lingkungan tertentu, maka rasa memiliki terhadap lingkungan cenderung lebih terlihat dalam partisipasinya yang besar dalam setiap kegiatan lingkungan tersebut.

Sedangkan menurut Holil (1980: 9-10), unsur-unsur dasar partisipasi sosial yang juga dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat adalah:

1. Kepercayaan diri masyarakat;
2. Solidaritas dan integritas sosial masyarakat;
3. Tanggungjawab sosial dan komitmen masyarakat;
4. Kemauan dan kemampuan untuk mengubah atau memperbaiki keadaan dan membangun atas kekuatan sendiri;
5. Prakarsa masyarakat atau prakarsa perseorangan yang diterima dan diakui sebagai/menjadi milik masyarakat;
6. Kepentingan umum murni, setidaknya-tidaknya umum dalam lingkungan masyarakat yang bersangkutan, dalam pengertian bukan kepentingan umum yang semu karena penunggalan oleh kepentingan perseorangan atau sebagian kecil dari masyarakat;
7. Organisasi, keputusan rasional dan efisiensi usaha;
8. Musyawarah untuk mufakat dalam pengambilan keputusan;
9. Kepekaan dan ketanggapan masyarakat terhadap masalah, kebutuhan-kebutuhan dan kepentingan-kepentingan umum masyarakat.

Faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam suatu program juga dapat berasal dari unsur luar/lingkungan. Menurut Holil (1980: 10) ada 4 poin yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat yang berasal dari luar/lingkungan, yaitu:

1. Komunikasi yang intensif antara sesama warga masyarakat, antara warga masyarakat dengan pimpinannya serta antara sistem sosial di dalam masyarakat dengan sistem di luarnya;
2. Iklim sosial, ekonomi, politik dan budaya, baik dalam kehidupan keluarga, pergaulan, permainan, sekolah maupun masyarakat dan bangsa yang menguntungkan bagi serta mendorong tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat;
3. Kesempatan untuk berpartisipasi. Keadaan lingkungan serta proses dan struktur sosial, sistem nilai dan norma-norma yang memungkinkan dan mendorong terjadinya partisipasi sosial;
4. Kebebasan untuk berprakarsa dan berkreasi. Lingkungan di dalam keluarga masyarakat atau lingkungan politik, sosial, budaya yang memungkinkan dan mendorong timbul dan berkembangnya prakarsa, gagasan, perseorangan atau kelompok.

Maka dari itu, partisipasi dalam kaitannya dengan proses pembangunan haruslah diartikan sebagai usaha mentransformasikan sistem, sebagai nilai kerja bagi masyarakat maupun pengelola pembangunan sehingga partisipasi berfungsi sebagai mesin pendorong pembangunan.

E. Bentuk dan Tipe Partisipasi

Menurut Sundria Munawar (dalam Hasbi, 2006 :47) menjelaskan bahwa dalam pelaksanaannya partisipasi masyarakat dapat digolongkan sebagai berikut :

1. Partisipasi Berupa Dana (Barang atau benda)

Yaitu partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat dalam bentuk sumbangan baik berupa (harta) atau uang. Hal ini biasanya dilakukan seseorang bila dia tidak mampu untuk berpartisipasi langsung dalam kegiatan pembangunan tersebut.

2. Partisipasi Berupa Tenaga (Fisik)

Yaitu partisipasi bersifat aktif yang dilakukan seseorang tau masyarakat dengan terjun langsung dalam kegiatan pembangunan. Dalam kehidupan masyarakat perkembangan berupa tenaga ini tampak pada pekerjaan gotong-royong, dan tenaga untuk pelaksanaan usaha-usaha yang dapat menunjang keberhasilan suatu program seperti bakti social, maupun keikutsertaan dalam ronda.

3. Partisipasi Berupa Keahlian (Keterampilan)

Yaitu partisipasi yang dilakukan oleh seseorang atau masyarakat dalam bentuk kemahiran yang dimilikinya untuk keperluan pembangunan tersebut. Misalnya partisipasi berupa ide, fikiran konstruktif baik untuk menyusun program maupun pelaksanaan program baik pemberian pengalaman, pengetahuan yang dimiliki serta member dorongan melalui keterampilan yang dimilikinya kepada anggota masyarakat lain yang membutuhkan seperti paguyuban dan arisan.

F. Pengertian masyarakat

Masyarakat (sebagai terjemahan istilah *society*) adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup (atau semi terbuka), dimana sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut. Kata *society* berasal dari bahasa latin, *societas*, yang berarti hubungan persahabatan dengan yang lain. *Societas* diturunkan dari kata *socius* yang berarti teman, sehingga arti *society* berhubungan erat dengan kata sosial. Secara implisit, kata *society* mengandung makna bahwa setiap anggotanya mempunyai perhatian dan kepentingan yang sama dalam mencapai tujuan bersama.

Menurut harold J. Laski (dalam Budiarmo, 2004: 34), masyarakat adalah sekelompok manusia yang hidup bersama dan bekerja sama untuk mencapai terkabulnya keinginan bersama, yang mana mereka hidup disatu wilayah yang mempunyai aturan-aturan yang mengatur mereka dan harus dita'ati oleh setiap orang, sehingga mereka hidup dalam keadaan terjaga keamanannya.

Menurut Ralf Linton (dalam Abdul Syani, 2002: 31) masyarakat adalah setiap kelompok manusia yang telah cukup lama hidup dan bekerja sama sehingga mereka dapat mengorganisasi dirinya dengan berfikir tentang dirinya dalam satu kesatuan social dengan batas-batas tertentu. Sedangkan ciri-ciri masyarakat yang hidup bersama adalah sebagai berikut:

1. Bercampur untuk waktu lama.
2. Mereka sadar bahwa mereka satu kesatuan.
3. Mereka merupakan satu sistem hidup bersama.

Masyarakat sering diorganisasikan berdasarkan cara utamanya dalam bermata pencaharian. Pakar ilmu sosial mengidentifikasikan ada: masyarakat pemburu, masyarakat pastoral nomadis, masyarakat bercocoktanam, dan masyarakat agrikultural intensif, yang juga disebut masyarakat peradaban. Sebagian pakar menganggap masyarakat industri dan pasca-industri sebagai kelompok masyarakat yang terpisah dari masyarakat agrikultural tradisional.

Dalam konsep An-Nas bahwa masyarakat adalah makhluk sosial. Manusia tidak dapat hidup sendiri dengan mengabaikan keterlibatannya dengan kepentingan pergaulan antara sesamanya dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam hubungan manusia dengan masyarakat terjadi interaksi aktif. Manusia dapat mengintervensi dengan masyarakat lingkungannya dan sebaliknya masyarakat pun dapat memberi pada manusia sebagai warganya. Oleh karena itu, dalam pandangan Islam, masyarakat memiliki karakteristik tertentu.

Prinsip-prinsip ini harus dijadikan dasar pertimbangan dalam penyusunan sistem pendidikan Islam. Masyarakat merupakan lapangan pergaulan antara sesama manusia. pada kenyataannya masyarakat juga dinilai ikut memberi pengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan dan perilaku manusia yang menjadi anggota masyarakat tersebut. Atas dasar pertimbangan ini, maka pemikiran tentang masyarakat mengacu pada penilaian bahwa:

1. Masyarakat merupakan kumpulan individu yang terikat oleh kesatuan dari berbagai aspek seperti latar belakang budaya, agama, tradisi kawasan lingkungan dan lain-lain.

2. Masyarakat terbentuk dalam keragaman adalah sebagai ketentuan dari Allah, agar dalam kehidupan terjadi dinamika kehidupan sosial, dalam interaksi antar sesama manusia yang menjadi warganya.
3. Setiap masyarakat memiliki identitas sendiri yang secara prinsip berbeda satu sama lain.
4. Masyarakat merupakan lingkungan yang dapat memberi pengaruh pada pengembangan potensi individu.

Dari beberapa penjelasan yang telah dijelaskan di atas, dapatlah diberi kesimpulan bahwa pengertian masyarakat yang penulis maksudkan ialah sekelompok manusia yang terdiri di dalamnya ada keluarga, masyarakat dan adat kebiasaan yang terikat dalam satu kesatuan aturan tertentu.

Dari beberapa penjelasan yang telah dijelaskan di atas, dapatlah diberi kesimpulan bahwa pengertian masyarakat yang penulis maksudkan ialah sekelompok manusia yang terdiri di dalamnya ada keluarga, masyarakat dan adat kebiasaan yang terikat dalam satu kesatuan aturan tertentu.

Dengan begitu, seseorang bisa berpartisipasi bila ia menemukan dirinya dengan yang lain atau dalam kelompok, melalui berbagai proses berbagi dengan orang lain dalam hal nilai, tradisi, perasaan, kesetiaan, kepatuhan dan tanggungjawab bersama.

G. Defenisi Konsep

Konsep merupakan suatu hal abstrak yang dibentuk dengan menggeneralisasikan hal-hal khusus dan digeneralisasikan sebagai volume. Dalam hal ini untuk memberikan batasan yang lebih jelas dari masing-masing konsep

yang akan diteliti. Adapun definisi konsep yang diajukan sehubungan penelitian ini adalah:

1. Partisipasi adalah keikutsertaan masyarakat dengan sadar dalam suatu program atau kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaannya partisipasi masyarakat dapat digolongkan sebagai partisipasi berupa dana, partisipasi berupa tenaga, partisipasi berupa keahlian. (Sundria Munawar, 2006 : 47).
2. Masyarakat adalah setiap kelompok manusia yang telah cukup lama hidup dan bekerja sama sehingga mereka dapat mengorganisasi dirinya dengan berfikir tentang dirinya dalam satu kesatuan sosial dengan batas-batas tertentu. (Ralf Linton, dalam Abdul Syani, 2002: 31).
3. Pembangunan desa merupakan proses pembangunan yang dilakukan dalam rangka sumbangan kewajiban yang wajar antara pemerintah dengan masyarakat desa, kewajiban itu adalah menyediakan prasarana-prasarana, memberikan bimbingan dan pengawasan, sedangkan selebihnya disandarkan kepada masyarakat itu sendiri.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten (UU No. 22 tahun 1999).

H. Konsep Operasional / Variabel

Untuk memudahkan dalam memahami serta menyamakan persepsi terhadap konsep-konsep yang digunakan, perlu dijelaskan dan dijabarkan konsep operasional sebagai berikut :

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang dimaksud adalah keikutsertaan masyarakat suku akit di Desa Teluk Pambang pada setiap tahap pembangunan, mulai dari merencanakan, melaksanakan, serta menikmati dan memelihara hasil pembangunan.

a) Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, maksudnya adalah keikutsertaan masyarakat dalam :

1. Menghadiri rapat/musyawarah desa sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam membahas pembangunan didesanya sendiri.
2. Memberikan ide atau pendapat didalam rapat mengenai perencanaan pembangunan tersebut.
3. Menyampaikan jenis pembangunan yang menjadi kebutuhan sosial masyarakat itu sendiri.

b) Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, maksudnya adalah keikutsertaan masyarakat dalam :

1. Memberikan bantuan berupa tenaga yaitu keikutsertaan masyarakat untuk bergotong royong dalam pelaksanaan pembangunan.
2. Memberikan bantuan berupa barang/materi yaitu kemampuan masyarakat dalam memberikan bantuan berupa uang atau barang lainnya yang mendukung dalam pelaksanaan pembangunan tersebut.

3. Memberikan informasi tentang pelaksanaan pembangunan yaitu keikutsertaan masyarakat dalam menentukan lokasi yang baik untuk pelaksanaan pembangunan tersebut.
- c) Partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan dan memelihara hasil pembangunan maksudnya adalah keikutsertaan masyarakat dalam :
1. Memanfaatkan hasil pembangunan yaitu keikutsertaan masyarakat dalam bertoleransi menikmati hasil-hasil pembangunan yang sudah ada.
 2. Memelihara hasil pembangunan yaitu keikutsertaan masyarakat dalam menjaga keutuhan hasil pembangunan tersebut.
 3. Merenovasi hasil pembangunan yaitu keikutsertaan masyarakat dalam memperbaiki hasil-hasil pembangunan yang sudah mengalami keusakan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi Waktu Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini adalah di Desa Teluk Pambang Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis, dimana yang mnjadi dasar pertimbangan untuk dijadikan sebagai objek adalah faktor-faktor penghambat dan pendukung partisipasi masyarakat suku akit. Penelitian ini dimulai pada tanggal 10 Desember 2012 sampai dengan 23 Februari 2013.

B. Jenis dan Sumber Data

Data pada penelitian ini diperoleh dengan menggunakan data primer dan skunder.

1. Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dan sumber pertama atau aslinya atau dengan kata lain perolehan data melalui kegiatan menulis secara langsung ke lokasi penelitian untuk mendapatkan data yang lengkap dan berkaitan dengan masalah yang diteliti. (Suryabrata, 2003: 39).
2. Data sekunder adalah data-data dimana penulis memperoleh informasi, keterangan-keterangan berasal dari dokumen, laporan dan arsip dari pihak terkait.

C. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang valid dan dapat dipercaya maka penulis dalam mengumpulkan data menggunakan teknik penelitian sebagai berikut :

1. Angket (*Quisioner*)

Yaitu peneliti mengajukan daftar pertanyaan kepada responden mengenai permasalahan dalam penelitian ini.

2. Wawancara (*Interview*)

Yaitu peneliti mengadakan tanya jawab kepada responden yang dijadikan sumber guna memperoleh informasi mengenai permasalahan yang hendak diteliti demi kesempurnaan data yang diperoleh.

3. Pengamatan Langsung (*Observation*)

Yaitu pengamatan secara langsung oleh peneliti dengan melihat dari dekat gejala-gejala yang ada dilapangan.

D. Populasi dan Sample

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. (Rosady Ruslan, 2003: 135). Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat suku akit Desa Teluk Pambang yang terdiri dari 825 Orang kemudian dibagi dalam satuan KK yaitu berjumlah 165 KK.

2. Sampel

Sampel yaitu sebagian dari populasi yang menjadi nara sumber data sebenarnya dalam suatu penelitian dan merupakan sebagian wakil dari populasi yang diteliti (Rosady Ruslan, 2003: 139). Dalam menarik sampel peneliti menggunakan rumus Slovin (Rosady Ruslan, 2003: 150).

$$n = \frac{N}{1+N(e)^2}$$

Keterangan:

n : Ukuran Sampel

N : Ukuran Populasi

e : Persentase ketidakteelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat di inginkan 10%.

$$n = \frac{N}{1+N(e)^2}$$

$$n = \frac{165}{1+165(10\%)^2}$$

$$n = \frac{165}{1+165(0,10)^2}$$

$$n = \frac{165}{1+165(0,01)}$$

$$n = \frac{165}{2.65}$$

$$n = 62.26$$

$$n = 63 \text{ Orang}$$

E. Analisa Data

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan metode Deskriptif Kualitatif yaitu data yang terkumpul dianalisa dengan menguraikan serta mengaitkan dengan teori-teori yang sesuai dengan permasalahan yang ada, kemudian akan memberikan interprestasi terhadap hasil yang relevan dan kemudian diambil kesimpulan dan saran.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Suku Akit/Asli Di Desa Teluk Pambang Kec. Bantan Kab. Bengkalis

Orang Akit atau orang Akik, adalah kelompok sosial yang berdiam di beberapa daerah di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau seperti Hutan Panjang dan Kecamatan Rupert, Sungai liung Kec. Bantan, Selat Baru, serta khususnya adalah Desa Teluk Pambang. Pada awal mulanya sebutan “Akit” diberikan kepada masyarakat ini karena sebagian besar kegiatan hidup mereka berlangsung di atas rumah sakit. Dengan rakit tersebut mereka berpindah dari satu tempat ke tempat lain di pantai laut dan muara sungai. Mereka juga membangun rumah-rumah sederhana di pinggir-pinggir pantai untuk dipergunakan ketika mereka mengerjakan kegiatan di darat. Tetapi di Desa Teluk Pambang suku akik ini lebih disebut sebagai suku asli.

(Wawancara bersama Bapak Zulham 43 tahun sebagai Sekdes Teluk Pambang, Desember : 2012) mengatakan : *Hubungan orang asli dengan masyarakat lain di sekitarnya boleh dikatakan sangat jarang. Hal ini didukung oleh kecenderungan mereka untuk mempertahankan identitas mereka. Beberapa waktu lampau mereka memang masih sering digolongkan sebagai “suku bangsa terasing”. Penduduk di sekitarnya banyak yang kurang berkenan menjalin hubungan dengan mereka, karena orang asli dulu nya dipercaya memiliki pengetahuan tentang ilmu hitam dan obat-obatan yang dapat membahayakan.*

sedangkan komunikasi dengan masyarakat di sekitarnya biasanya dilakukan dengan menggunakan bahasa Melayu Lama.

B. Keadaan Georafis Desa Teluk Pambang Kec. Bantan Kab. Bengkalis

Desa Teluk Pambang adalah salah satu desa yang ada di Kec. Bantan Kab. Bengkalis, dengan luas wilayah 2622, 669 hektar (ha), sebagian besar terdiri dari tanah pemukiman, perkebunan, fasilitas umum desa dan tanah basah. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada table 4.1. berikut ini :

Table 4.1.
Persentase Penggunaan Lahan Desa Teluk Pambang
Kec. Bantan Kab. Bengkalis

NO	Penggunaan	Luas (ha)	Persentase (%)
1	Tanah kering	2,327	88,73 %
2	Tanah basah	277	10,56 %
3	Tanah perkebunan	18, 169	0,69 %
4	Tanah fasilitas umum	0,5	0,02 %
Jumlah		2622,669	100 %

Sumber Data : kantor kepala desa tahun 2011

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa lahan di desa teluk pambang sebagian besar adalah tanah kering yaitu tanah pemukiman seluas 2,327 ha dengan persentase 88,73 %, untuk tanah basah seperti rawa dan tanah pasang surut seluas 277 ha dengan persentase 10,56 %, kemudian tanah perkebunan seperti tanah perkebunan rakyat dan tanah perkebunan swasta seluas 18,169 dengan persentase 0,69 % dan fasilitas umum seperti tanah perkantoran pemerintah hanya memiliki lahan sebesar 0,5 % ha dengan persentase 0,02 %.

Desa Teluk Pambang terletak disebelah timur ibu kota kecamatan bantan. Adapun batas wilayah desa teluk pambang adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah utara berbatasan dengan desa muntai
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan desa kembung luar
- c. Sebelah barat berbatasan dengan desa pematang duku
- d. Sebelah timur berbatasan dengan laut selat Melaka

C. Jumlah Masyarakat Suku Akit/Asli Di Desa Teluk Pambang Kec. Bantan Kab. Bengkalis

Jumlah masyarakat suku akit berdasarkan profil Desa Teluk Pambang Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis Tahun 2010/2011 tentang jumlah masyarakat suku akit sebagai berikut : berjumlah 825 orang yang terdiri dari laki-laki sebanyak 389 orang, perempuan sebanyak 436 orang, janda sebanyak 32 orang dan duda sebanyak 11 orang dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 165 KK. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada table 4.1. berikut ini :

Tabel 4.2.
Jumlah Masyarakat Suku Akit di Desa Teluk Pambang

NO	RW	Jumlah	Persentase (%)
1	01 (Sungai Raya)	591	71,63 %
2	02 (Sukajadi)	72	8,72 %
3	03 (Banan)	85	10,30 %
4	04 (Sei. Rambai)	28	3,39 %
5	05 (Parit I)	-	-
6	06 (Parit II)	34	4,12 %
7	07 (Parit III)	15	1,81 %
8	08 (Parit III)	-	-
9	09 (Parit III)	-	-
Jumlah		825	100 %

Sumber Data : Kantor Desa Teluk Pambang, Tahun 2010/2011

Dari table diatas dapat dilihat bahwa masyarakat suku asli yang paling banyak adalah tinggal di RW (01) Sungai Raya yaitu 591 orang dengan persentase 71,63 % sedang di RW (02) Sukajadi berjumlah 72 orang dengan persentase 8,72 %, RW (03) Banan berjumlah 85 orang dengan persentase 10,30 %, RW (04) Sungai Rambai berjumlah 28 orang dengan persentase 3,39 %, RW (06) Parit II berjumlah 34 orang dengan persentase 4,12 %, RW 07 berjumlah 15 orang dengan persentase 1,81 %, sedangkan di RW 05, 08 dan 09 tidak terdapat masyarakat suku asli yang tinggal disana.

Kemudian, pada tabel 4.3 akan menjelaskan tentang jumlah klasifikasi masyarakat suku asli di Desa Teluk Pambang menurut kelompok umur :

Tabel 4.3
Jumlah Masyarakat Suku Akit Berdasarkan Klasifikasi Umur

NO	Kelompok Umur (Tahun)	Jumlah	Persentase (%)
1	0 - 5	41	4.97 %
2	5 - 10	78	9.46 %
3	11 - 15	95	11.52 %
4	16 - 20	47	5.70 %
5	21 - 25	42	5.10 %
6	26 - 30	55	6.67 %
7	31 - 35	87	10.55 %
8	36 - 40	171	20.73 %
9	41 - 45	77	9.34 %
10	46 - 50	58	7.04 %
11	51 - 55	43	5.22 %
12	56 - 50	22	2.67 %
13	> 61	9	1.10 %
Jumlah		825	100 %

Sumber Data : Kantor Desa Teluk Pambang, Tahun 2010/2011

Berdasarkan tabel diatas maka dapat dikatakan bahwa masyarakat suku asli Desa Teluk Pambang dominan ditempati oleh penduduk yang berusia 36-40 tahun yaitu 7 berjumlah 171 orang dengan persentase 20.73 %, sedangkan jumlah penduduk yang paling sedikit adalah mereka yang sudah memasuki usia yang tidak produktif yaitu 61 tahun keatas dengan jumlah sebanyak 9 orang dengan persentase 1.10 %.

D. Pendidikan

Pendidikan adalah sebagai wahana untuk membekali manusia dengan pengetahuan sebagai modal dasar bagi pembangunan dan juga ikut mempengaruhi tingkat sosial serta perekonomian masyarakat. Pendidikan masyarakat suku asli di Desa Teluk Pambang dapat dikatakan sudah mulai berkembang dengan baik. Karena pada masa sekarang masyarakat suku asli banyak yang sudah bersekolah walaupun mayoritas dari mereka hanya tamatan SLTA namun sudah bisa membaca dan menulis.

Tabel 4.4
Jumlah Sarana Pendidikan di Desa Teluk Pambang

No	Jenis Sekolah	Jumlah
1	SLTA/Sederajat	2 Unit
2	SLTP/Sederajat	2 Unit
3	SD/Sederajat	11 Unit
4	TK	1 Unit
5	TPA	23 Unit
Jumlah		39 Unit

Sumber Data : kantor kepala desa tahun 2011

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa sarana pendidikan di Desa Teluk Pambang sudah memadai dilihat dengan adanya 2 Unit SLTA/Sederajat, 2 Unit SLTP /Sederajat, 11 Unit SD/Sederajat, 1 Unit TK dan 23 Unit TPA.

Adapun tingkat pendidikan masyarakat suku akit Desa Teluk Pambang dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut :

Tabel 4.5
Tingkat Pendidikan Masyarakat Suku Akit Desa Teluk Pambang

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Penduduk	Persentase (%)
1	Belum Sekolah	79	9.58 %
2	Tidak Sekolah	214	25.94 %
3	Tidak Tamat SD	248	30.07 %
4	Tamat SD	140	16.97 %
5	Tamat SLTP	87	10.54 %
6	Tamat SLTA	57	6.91 %
7	Perguruan Tinggi	-	
Jumlah		825 orang	100 %

Sumber Data : kantor kepala desa tahun 2011

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa sebesar 248 orang atau 30.07 % dari masyarakat suku akit ini yang tidak tamat SD, sebesar 79 orang atau 9.58 % yang belum sekolah, sebesar 214 orang atau 25.94 % dari mereka yang tidak sekolah, sebesar 140 orang atau 16.97 % dari mereka yang hanya tamat SD, sebesar 87 orang atau 10.54 % dari mereka yang tamat SLTP dan sebesar 57 orang atau 6.91 % dari mereka yang tamat SLTA, sedangkan untuk jenjang perguruan tinggi belum ada satu pun dari masyarakat suku akit ini yang mendapat gelar sarjana.

E. Agama

Pada masa dahulu masyarakat suku akit dikenal banyak menganut kepercayaan animistik. Tetapi pada masa sekarang masyarakat ini telah banyak menganut agama budha. Pengaruh agama Budha ini mereka terima dari kalangan etnis china yang banyak datang dan menetap ke daerah ini, kemudian ada beberapa dari mereka yang melakukan kawin silang atau yang disebut peranakan.

Jumlah masyarakat suku asli yang ada di Desa Teluk Pambang berdasarkan agama yang dianut dapat dilihat pada tabel 4.6 dibawah ini :

Tabel 4.6
Jumlah Masyarakat Suku Asli Berdasarkan Agama yang Dianut

No	Agama	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Budha	815	98.79 %
2	Kristen	10	1.22 %
Jumlah		825	100 %

Sumber Data : Kantor Kepala Desa Teluk Pambang 2011

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa mayoritas masyarakat suku asli Desa Teluk Pambang adalah beragama budha dengan jumlah 815 orang dengan persentase 98.79 %, kemudian sisa nya yang beragama kristen berjumlah 10 orang dengan jumlah persentase 1.22 %.

Adapun sarana rumah ibadah yang terdapat di Desa Teluk Pambang dapat dilihat pada tabel 4.7 berikut :

Tabel 4.7
Jumlah Sarana Rumah Ibadah Desa Teluk Pambang

No	Jenis Rumah Ibadah	Jumlah
1	Mesjid	7 Unit
2	Musholla	11 Unit
3	Wihara	4 Unit
4	Gereja	1 Unit
Jumlah		23 Unit

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Rumah Ibadah Mesjid yang terdapat di Desa Teluk Pambang sebanyak 7 Unit, Musholla sebanyak 11 Unit, adapun Wihara sebanyak 4 Unit dan Gereja 1 unit.

F. Mata Pencarian

Mata pencaharian pokok orang asli adalah buruh yaitu mengumpulkan hasil hutan (menebang kayu bakau) dan dibarengi dengan berburu binatang, baik didarat maupun dipinggiran sungai. Orang Asli tidak mengenal sistem perladangan secara menetap. Pengambilan hasil hutan yang ada di tepi-tepi pantai biasanya disesuaikan dengan jumlah kebutuhan. Penangkapan ikan atau binatang laut lainnya mereka lakukan dengan cara sederhana, misalnya dengan memasang perangkap ikan seperti lokah, jaring dan jala.

Mata pencarian masyarakat suku asli Desa Teluk Pambang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.8
Mata Pencarian Masyarakat Suku Asli Desa Teluk Pambang

NO	Mata Pencarian	Jumlah	Persentase (%)
1	Buruh	233	53,56
2	Berburu	120	27,58
3	Berternak	5	1,14
4	Tani	80	18,39
5	Berdagang	1	0,22
jumlah		435	100 %

Sumber : Kantor Kepala Desa Teluk Pambang 2011

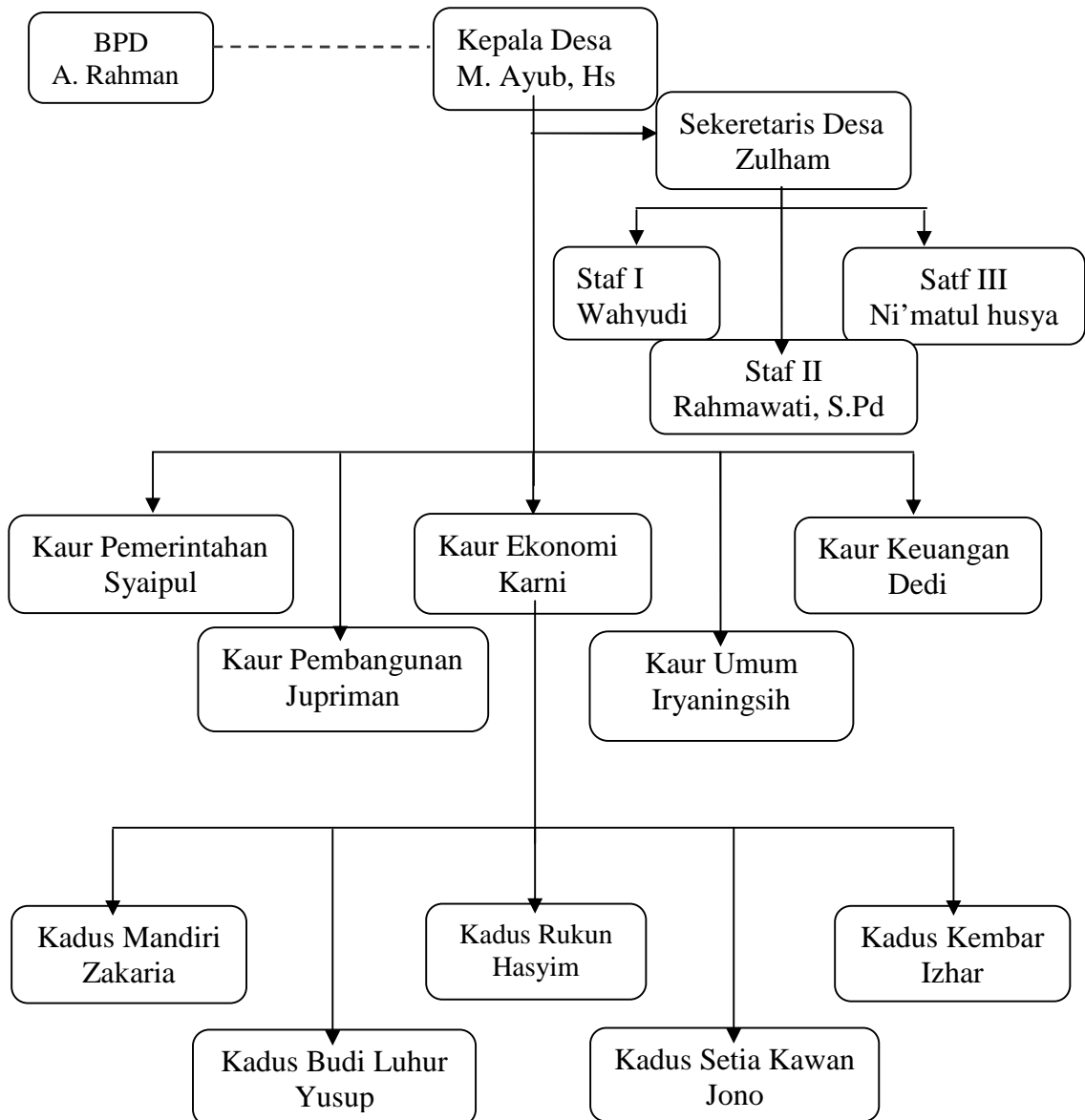
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa mayoritas dari mata pencarian masyarakat suku asli adalah buruh yaitu 233 orang dengan persentase 53,56 %, kemudian berburu yaitu 120 orang dengan persentase 27,58 %, beternak yaitu 5 orang dengan persentase 1,14 %, bertani 80 orang dengan persentase 18,39 %, dan yang paling sedikit adalah berdagang yaitu 1 orang dengan persentase 0,22 %.

G. Pemerintah Desa

Sistem pemerintahan desa teluk pambang sesuai dengan Undang-undang dan Perda Kabupaten Bengkalis, bahwa desa dipimpin oleh satu kepala daerah yaitu kepala desa yang dilantik oleh bupati kemudian dibantu oleh BPD dan dibawahnya dibantu oleh sekretaris desa beserta staf. Untuk mempermudah roda pemerintahan dan pembangunan dibentuk beberapa Kepala Urusan sesuai dengan bidangnya yaitu Kaur Pemerintahan, Kaur Pembangunan, Kaur Ekonomi, Kaur Umum dan Kaur Keuangan kemudian didukung oleh masing-masing kepala dusun didesa teluk pambang ini.

Untuk lebih jelas perhatikan bagan pemerintahan desa teluk pambang dibawah ini :

Gambar.1. Bagan pemerintahan Desa Teluk Pambang Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis.



Sumber Data : Kantor Kepala Desa Teluk Pambang 2011

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden

Masyarakat sebagai objek dan subjek dalam peningkatan pembangunan harus diikuti sertakan secara aktif dalam pembangunan dan menikmati hasil pembangunan serta melestarikan proses pembangunan, sementara pemerintah berperan sebagai pendukung untuk memperlancar dan pengendali proses pembangunan.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dan angket yang disebarkan maupun wawancara langsung dapat diklasifikasi mengenai keberadaan responden yang menjadi nara sumber dalam penelitian mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan di desa Teluk Pambang Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis sebagai berikut :

1. Identitas Responden Menurut Jenis Kelamin

Adapun identitas responden menurut jenis kelamin dapat dilihat pada table berikut:

Table 5.1. Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1	Laki-laki	45 Orang	71.43 %
2	Perempuan	18 Orang	28.58 %
Jumlah		63 Orang	100 %

Sumber Data: dari lapangan 2013

Berdasarkan table identitas responden menurut jenis kelamin diatas dapat diketahui bahwa dalam penelitian ini jenis kelamin laki-laki lebih banyak dengan

jumlah 45 orang (71.43 %) sedangkan jenis kelamin perempuan berjumlah 18 orang dengan persentase (28.58 %). Karena laki-laki selain sebagai kepala rumah tangga lebih dominan melakukan partisipasi dibandingkan perempuan, dengan keadaan ini diharapkan proses pembangunan desa akan lebih lancar.

2. Identitas Responden Menurut Tingkat Umur

Adapun identitas responden menurut jenis kelamin dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 5.2. Identitas Responden Berdasarkan Umur

No	Umur	Jumlah	Persentase (%)
1	17-20 Tahun	8 Orang	12.70 %
2	21-27 Tahun	11 Orang	17.47 %
3	28-34 Tahun	17 Orang	34.93 %
4	35-41 Tahun	22 Orang	26.99 %
5	42-53 Tahun	5 Orang	7.94 %
Jumlah		63 Orang	100 %

Sumber Data: dari lapangan 2013

Dilihat dari tabel diatas dapat diketahui bahwa mayoritas dari masyarakat yang dijadikan responden adalah mereka yang berkisar pada umur 35-41 tahun yaitu berjumlah 22 orang dengan persentase (34.93%), sedangkan responden yang berumur 17-20 Tahun berjumlah 8 orang dengan persentase (12.70%), responden yang berumur 21-27 tahun berjumlah 11 orang dengan persentase (17.47%), dan responden yang berumur 28-34 tahun berjumlah 17 orang dengan persentase (26.99 %), sedangkan responden yang paling sedikit berumur 42-53 tahun berjumlah 5 orang dengan persentase (7.94%).

Responden yang berkisar pada umur 35-41 tahun dapat dikatakan produktif dan lebih berpengalaman dalam bertindak dan mengambil keputusan untuk memperlancar proses pembangunan.

3. Identitas responden menurut mata pencarian

Berikut merupakan identitas responden menurut mata pencarian :

Tabel 5.3. Identitas Responden Berdasarkan Mata Pencarian

No	Mata Pencarian	Jumlah	Persentase (%)
1	Buruh	30 orang	47.62 %
2	Berburu	25 orang	39.69 %
3	Beternak	2 orang	3.18 %
4	Tani	5 orang	7.94 %
5	Berdagang	1 orang	1.59 %
Jumlah		63 KK	100 %

Sumber Data : dari lapangan 2013

Dilihat dari tabel diatas dapat diketahui bahwa mata pencarian masyarakat suku akit ini adalah buruh yaitu 30 orang dengan persentase 47.62 %, berburu sebanyak 25 orang dengan persentase 39.69 %, beternak sebanyak 2 orang dengan persentase 3.18 %, tani sebanyak 5 orang dengan persentase 7.94 % dan pedagang 1 orang dengan persentase 1.59 %.

Tabel 5.3 diatas juga menjelaskan bahwa mayoritas mata pencarian suku akit adalah sebagai buruh kemudian disusul dengan berburu. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam mendukung kegiatan pembangunan sulit untuk dijangkau disebabkan kesibukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

B. Partisipasi Masyarakat Suku Akit Dalam Mendukung Kegiatan Pembangunan Didesa Teluk Pambang

1. Partisipasi dalam Perencanaan Pembangunan

Pada dasarnya strategi pelaksanaan partisipasi dicapai dengan cara melibatkan masyarakat dalam sharing informasi, merumuskan tujuan, mensetting kebijakan, mengalokasikan sumber-sumber pendanaan, mengoperasikan program, serta mendistribusikan manfaat yang diperoleh, dengan kata lain, melibatkan masyarakat sejak tahap perencanaan hingga implementasi dan pemerataan hasil hasilnya.

Nah, untuk melihat bagaimana keterlibatan masyarakat dalam mendukung kegiatan pembangunan, seiring dengan penelitian di masyarakat Desa Teluk Pambang, sesuai pertanyaan yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.

Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat melalui distribusi jawaban responden pada tabel 5.4, dibawah ini:

Tabel 5.4 Tanggapan Responden tentang partisipasi masyarakat dalam menghadiri rapat pembangunan desa.

No	Kategori	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sering	28	44.45 %
2	Kadang-kadang	33	52.39 %
3	Tidak	2	3.18 %
Jumlah		63	100 %

Sumber Data : dari lapangan 2013

Dari tabel diatas dapat penulis jelaskan bahwa dari 63 Orang masyarakat yang dijadikan responden terdapat 28 orang dari mereka atau 44.45 % yang masih peduli terhadap keinginan mereka tentang perencanaan pembangunan yang akan

diagendakan oleh desa, mayoritas dari masyarakat yang peduli ini adalah mereka yang menjabat sebagai RT/RW setempat dalam suku asli ini sedangkan 33 orang atau 52.39 % dari mereka menjawab “kadang-kadang”, jumlah ini lebih besar dibandingkan dari mereka yang menjawab sering, ini disebabkan karena kesibukan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan sementara yang tidak terlibat sebanyak 2 orang saja atau 3.18 % dari masyarakat suku akit tersebut, karena pengaruh umur yang sudah lanjut usia menyebabkan dua orang responden ini tidak ingin terlibat dalam proses pembangunan di desa teluk pambang.

Menurut Bapak Zulham (43) tahun Sekretaris Desa Teluk Pambang (dalam wawancara, Februari 2013) mengatakan *“mayoritas dari masyarakat suku asli ini bekerja didaerah pinggiran sungai yaitu sebagai penambang kayu bakau, mencari siput, dan menangkap ikan, sehingga mereka jauh dari keramaian dan tidak sempat untuk memikirkan urusan-urusan tentang pembangunan desa”*.

Analisa dari jawaban masyarakat suku akit desa teluk pambang tersebut telah menunjukkan bahwa pengaruh usia serta pekerjaan dan penghasilan yang baik dan mencukupi kebutuhan sehari-hari memberi pengaruh besar pada masyarakat dalam berpartisipasi. Ini artinya bahwa untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan, harus didukung oleh faktor usia yang memadai serta suasana perekonomian yang mapan.

Selain itu, faktor pendidikan juga memberi pengaruh besar kepada masyarakat dalam berpartisipasi khususnya dalam menyampaikan aspirasi. Hal ini, dapat dilihat langsung dalam tabel 5.5 berikut :

Tabel 5.5. Tanggapan Responden tentang partisipasi masyarakat dalam menyumbangkan pendapat pada rapat pembangunan.

No	Kategori	Frekuensi	Persentase (%)
1	Ya	24	38.10 %
2	Kadang-kadang	31	49.21 %
3	Tidak	8	12.70 %
Jumlah		63	100 %

Sumber Data : dari lapangan 2013

Dari tabel diatas, berdasarkan pertanyaan yang telah disebarkan dilapangan menunjukkan bahwa 63 orang yang dijadikan responden hanya 24 orang atau 38.10 % dari mereka yang menjawab selalu aktif menyumbangkan pendapat dalam rapat, dan 31 orang atau 49.21 % menjawab kadang-kadang serta 8 orang atau 12.70 % dari mereka menjawab tidak pernah menyumbangkan aspirasinya didalam rapat.

Uraian tabel diatas juga menjelaskan tentang rendahnya partisipasi masyarakat suku akit didalam menyampaikan aspirasinya didalam rapat. Ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah tentang pembangunan yang akan diselenggarakan menyebabkan masyarakat kurang faham arti pembangunan tersebut serta lemahnya pengetahuan masyarakat dalam menanggapi pembangunan yang direncanakan.

Aspirasi masyarakat sangat menentukan kemana arah pembangunan akan dicapai demi mewujudkan pembangunan yang efektif dalam arti sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Menurut Adiqu (45) tahun yang merupakan seorang RT.07 di RW.06 Desa Teluk Pambang sekaligus perwakilan dari masyarakat suku akit Rukun Warga setempat (dalam wawancara, Februari 2013) mengatakan “*sebenarnya banyak yang menjadi keinginan dari masyarakat kami didalam*

pembangunan tersebut. Cuma, mereka tidak mampu untuk menyampaikannya secara formal atau ditengah rapat. Seringkali aspirasi mereka disampaikan melalui saya kemudian saya yang akan menyampaikan ditengah rapat sebagai perwakilan dari masyarakat suku akit". Menurut Bapak Kobu (33) tahun dan Aking (25) tahun, *"kita ini bukan orang yang berpendidikan, jadi tak perlu rasanya menghadiri rapat cukuplah mereka yang mengerti saja"*. (wawancara, Februari : 2013).

Berdasarkan data diatas mengungkapkan bahwa sebenarnya telah ada kesadaran dari sebagian masyarakat suku akit ini untuk bisa ikut terlibat dalam proses pembangunan. Namun, keterampilan untuk berbicara ditengah masyarakat menjadi penghambat untuk menyampaikan aspirasinya. Jika begitu, seberapa pentingkah rapat tentang pembangunan bagi masyarakat suku akit ini? Untuk menjawab pertanyaan berikut dapat kita perhatikan pada tabel 5.6 dibawah ini :

Tabel 5.6. Tanggapan responden tentang pentingnya perencanaan dalam pembangunan desa.

No	Kategori	Frekuensi	Persentase (%)
1	Ya	47	74.61 %
2	Kadang-kadang	16	25.40 %
3	Tidak	-	-
Jumlah		63	100%

Sumber Data : dari lapangan 2013

Dari tabel diatas dapat dijelaskan ternyata masyarakat suku akit juga menginginkan perencanaan pembangunan yang matang yaitu dari 63 orang yang dijadikan responden 47 orang atau 74.61 % dari mereka menjawab "Ya", dan hanya 16 orang atau 25.40 % yang menjawab kadang-kadang, serta tidak seorang responden pun yang menjawab tidak.

Memberikan sumbangan pemikiran memang butuh keterampilan untuk bicara, keberanian dan perspektif tinggi, berpandangan jauh kedepan sehingga mampu memberikan informasi dan solusi yang komplit untuk perencanaan pembangunan tersebut. Mereka yang berpendidikan tinggi serta berpengalaman luas sering terlibat dalam perencanaan pembangunan sedangkan mereka yang termasuk golongan tertinggal pendidikan hanya mampu mengikuti keputusan tersebut serta membantu sebisa mampu untuk mendukung kelancaran proses pembangunan. Tabel 5.7 berikut menjelaskan tentang partisipasi masyarakat suku asli Desa Teluk Pambang dalam mendukung kelancaran proses pembangunan.

Tabel 5.7 Tanggapan responden dalam mendukung dalam kelancaran proses pembangunan.

No	Kategori	Frekuensi	Persentase (%)
1	Selalu	34	53.96 %
2	Kadang-kadang	26	41.27 %
3	Tidak	3	4.77 %
Jumlah		63	100%

Sumber Data : dari lapangan 2013

Berdasarkan tabel diatas sesuai dengan hasil observasi peneliti dilapangan, dari 63 orang yang dijadikan responden 34 orang atau 53.96 % dari masyarakat suku asli ini menyatakan selalu mendukung dalam kelancaran proses pembangunan, mereka ini tergolong dari kaula muda dan 26 orang atau 41.27 % dari mereka menjawab kadang-kadang karena alasan tuntutan kerja terkadang memakan waktu dari pagi hingga sore serta hanya 3 orang saja atau 4.77 % dari mereka sebagai responden yang fakum terhadap proses pembangunan.

(Wawancara terhadap bapak Kabit 41 tahun, februari 2013) menurutnya *mereka khususnya generasi muda yang sudah menelan pendidikan serta banyak*

bergaul dengan teman sebaya disekolah mungkin, telah membuka wawasan mereka untuk berubah dan menyamai mereka seperti dibidang olahraga, baris-berbaris, dan turut serta dalam acara besar seperti HUT - RI .

Tabel 5.8 Tanggapan responden dalam menentukan kebijakan arah pembangunan secara bersama.

No	Kategori	Frekuensi	Persentase (%)
1	Ya	52	82.54 %
2	Kadang-kadang	8	12.70 %
3	Tidak	3	4.77 %
Jumlah		63	100%

Sumber Data : dari lapangan 2013

Berdasarkan tabel diatas, dari 63 orang yang dijadikan responden 52 orang atau 82.54 % menyatakan kebijakan arah pembangunan merupakan kepentingan bersama. Hal ini, tidak menutup kemungkinan karena pembangunan desa yang efektif adalah pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hanya 8 orang atau 12.70 % dari mereka menjawab kadang-kadang dan 3 orang atau 4.77 % yang menjawab tidak.

Jadi, berdasarkan data hasil penelitian dilapangan diatas menunjukkan bahwa masyarakat suku asli di Desa Teluk Pambang ini menginginkan perencanaan pembangunan yang matang untuk kelancaran pertumbuhan dan perkembangan masyarakat, tetapi lemahnya faktor pendidikan berpengaruh pada keterampilan berbicara ditengah musyawarah serta ketidak tahuan masyarakat tentang persoalan desa membuat mereka fakum dan hanya menerima hasil keputusan dari atas.

Selain itu, kurangnya komunikasi dengan masyarakat luar berpengaruh pada lambannya perkembangan suatu masyarkat tersebut serta kesibukan dalam

memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari juga menjadi faktor penghambat masyarakat suku asli untuk berpartisipasi aktif dalam mendukung kegiatan perencanaan pembangunan desa.

2. Partisipasi dalam Pelaksanaan Pembangunan

Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dengan sadar dalam suatu program atau kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaannya partisipasi masyarakat dapat digolongkan sebagai partisipasi berupa dana (*barang atau benda*), partisipasi berupa tenaga (*fisik*), partisipasi berupa *keahlian / keterampilan* (Sundria Munawar, 2006 : 47).

Partisipasi sering dikaitkan dengan kegiatan-kegiatan yang bernuansa pembangunan, teori diatas menjelaskan tentang pentingnya kerja sama masyarakat dalam mendukung kegiatan pembangunan demi untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan masyarakat. Salah satu bentuk partisipasi tersebut adalah partisipasi berupa tenaga (*fisik*), gotong royong merupakan tradisi bagi masyarakat desa untuk bersama-sama melakukan kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat. Melalui angket yang disebarkan dapat diketahui jawaban tentang keterlibatan masyarakat suku akit didesa teluk pambang dalam melakukan gotong royong, dari 63 orang yang dijadikan responden ternyata 48 orang atau 76.20 % dari mereka menyatakan sering terlibat dalam kegiatan gotong royong, sedangkan hanya 11 orang atau 17.47 % dari mereka menjawab kadang-kadang serta 4 orang atau 6.35 % dari mereka menjawab tidak bisa ikut bergotong royong karena faktor usia serta faktor kesehatan. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada tabel 5.9 dibawah ini :

Tabel 5.9. Tanggapan responden dalam melakukan gotong royong pembangunan yang diagendakan oleh desa

No	Kategori	Frekuensi	Persentase (%)
1	Ya	48	76.20 %
2	Kadang-kadang	11	17.47 %
3	Tidak	4	6.35 %
Jumlah		63	100%

Sumber Data : dari lapangan 2013

Menurut bapak kabit 41 tahun sebagai kepala suku akit Desa Teluk Pambang (Wawancara, Februari 2013) menyatakan dalam *kegiatan gotong royong yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat itu sendiri mereka sangat antusias sekali seperti gotong royong pembangunan jembatan dan pembersihan jalan yang menghubungkan masyarakat dengan lokasi pekerjaan.*

Dari data diatas menyatakan bahwa masyarakat suku akit desa teluk pambang sangat antusias sekali dalam berpartisipasi berupa tenaga seperti gotong royong massal khususnya pembangunan yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat itu sendiri.

Dalam teori Sundria Munawar juga dijelaskan selain partisipasi berupa tenaga (*fisik*) terdapat juga partisipasi berupa dana yaitu berupa barang atau benda. Dihubungkan dengan penelitian dilapangan dapat diketahui jawaban responden tentang keterlibatatan masyarakat suku akit dalam penyaluran dana untuk pembangunan desa yaitu dari 63 orang yang dijadikan responden, 32 orang atau 50.80% dari mereka yang menjawab ya, jumlah ini sedikit lebih besar dari mereka yang menjawab kadang-kadang, yaitu sekitar 18 orang atau 28.58 % sedangkan 13 orang atau 20.64 % dari mereka menjawab tidak sanggup untuk ikut iuran dalam pembangunan desa. ini di karenakan iuran tersebut sudah ditentukan

dalam keputusan rapat dan menjadi tanggung jawab masyarakat itu sendiri untuk menutupi kekurangan dana yang sudah disalurkan dari pemerintah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 5.10 dibawah ini :

Tabel 5.10. Tanggapan responden dalam penyaluran dana untuk pembangunan desa.

No	Kategori	Frekuensi	Persentase (%)
1	Ya	32	50.80 %
2	Kadang-kadang	18	28.58 %
3	Tidak	13	20.64 %
Jumlah		63	100 %

Sumber Data : dari lapangan 2013

Partisipasi dalam bentuk material/barang sangat ditentukan oleh daya kemampuan ekonomi masyarakat. Semakin tinggi penghasilan yang diraih maka akan semakin sejahtera pula kehidupan masyarakat tersebut. Dengan begitu, keikutsertaan masyarakat dalam iuran pembangunan akan lebih lancar. Dalam hal ini, apakah masyarakat suku akit merasa keberatan dengan iuran yang sudah ditentukan. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, bisa dilihat pada tabel 5.11 berikut :

Tabel 5.11. Tanggapan responden tentang keberatan dalam memberikan sumbangan dana yang sudah ditetapkan.

No	Kategori	Frekuensi	Persentase (%)
1	Ya	49	77.78 %
2	Kadang-kadang	12	19.05 %
3	Tidak	2	3.18 %
Jumlah		63	100%

Sumber Data : dari lapangan 2013

Dari tabel diatas, 63 orang masyarakat yang dijadikan responden 49 orang atau 77.78% dari masyarakat suku akit ini menjawab keberatan dengan iuran yang telah ditetapkan. Hal ini, disebabkan karena pendapatan masyarakat yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan, 12 orang atau 19.05% dari mereka

menjawab kadang-kadang dan hanya 2 orang atau 3.18 % dari mereka menyatakan tidak keberatan dengan iuran yang ditetapkan tersebut.

Hasil (wawancara Februari, 2013) kepada bapak Kabit (41) tahun, menurutnya *“pendapatan masyarakat suku asli ini hanya pas-pasan, istilah orang melayu kais pagi makan pagi, kais petang makan petang”*.

Dari data diatas dapat dijelaskan bahwa lemahnya kemampuan ekonomi menyebabkan masyarakat suku akit merasa keberatan dengan iuran yang sudah ditetapkan. Namun, mayoritas dari mereka tetap berusaha untuk mampu memenuhi tuntutan tersebut seperti yang tergambar dalam tabel 5.9 tentang partisipasi masyarakat dalam penyaluran dana untuk pembangunan desa.

Adapun berdasarkan teori sundria munawar setelah partisipasi berupa dana (barang atau benda) serta partisipasi berupa tenaga (fisik) yang sudah dikaitkan dengan pertanyaan diatas, bentuk partisipasi berikutnya adalah partisipasi berupa keahlian (keterampilan). Dalam hal ini, berdasarkan 63 orang yang dijadikan responden 41 orang atau 65.08 % dari mereka menjawab ikut terampil dalam menentukan arah lokasi pembangunan supaya lebih terarah dan lebih jelas wilayah pembangunan tersebut. Sedangkan 19 orang atau 30.16 % dari mereka menjawab kadang-kadang dan hanya 3 orang atau 4.77 % dari tanggapan responden yang menyatakan tidak ikut serta. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 5.12 dibawah ini :

Tabel 5.12. Tanggapan responden tentang keterampilan dalam membantu menentukan arah lokasi pembangunan

No	Kategori	Frekuensi	Persentase (%)
1	Ya	41	65.08 %
2	Kadang-kadang	19	30.16 %
3	Tidak	3	4.77 %
Jumlah		63	100%

Sumber Data : dari lapangan 2013

Tabel diatas menunjukkan partisipasi masyarakat suku akit dalam membantu menentukan arah lokasi pembangunan boleh dikatakan baik. Keterampilan dalam menentukan arah lokasi pembangunan akan membuat pembangunan tepat sasaran dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, letaknya yang strategis akan menampilkan susunan pembangunan yang indah dan menarik. Selain itu, untuk menghindari dari terjadinya sengketa lokasi pembangunan dikemudian hari arah lokasi pembangunan demi kepentingan umum hendaknya ditetapkan melalui keputusan bersama.

Berkaitan dengan teori partisipasi yang dibahas oleh penulis melalui angket dan wawancara dilapangan, penduduk masyarakat suku akit desa teluk pambang menyatakan dari 63 orang yang dijadikan responden, 18 orang atau 28.58 % dari mereka menyatakan siap untuk turut berpartisipasi jika lokasi pembangunan mengenai lahan yang dimilikinya, sedangkan 37 orang atau 58.74 % menjawab kadang-kadang dan 8 orang atau 12.70 % yang menyatakan tidak siap untuk melepas lahannya tersebut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel 5.13 dibawah ini :

Tabel 5.13. Tanggapan responden tentang partisipasi masyarakat, jika lokasi pembangunan mengenai lahan yang dimiliki masyarakat

No	Kategori	Frekuensi	Persentase (%)
1	Ya	18	28.58 %
2	Kadang-kadang	37	58.74 %
3	Tidak	8	12.70 %
Jumlah		63	100 %

Sumber Data : dari lapangan 2013

Menurut Bapak Alay (38) tahun : *Daerah kita ini masih banyak terdapat hutan jadi untuk membangun sebuah lahan kosong kita butuh tenaga keras untuk membersihkan lokasi tersebut. Jika, lokasi pembangunan mengenai lahan punya kita, pemerintah atau pihak yang terkait harus memberikan ganti rugi yang seimbang supaya proses pembangunan juga akan lebih lancar* (Wawancara, Februari 2013).

Dari hasil data diatas dapat disimpulkan bahwa penentuan lokasi pembangunan sangat lah penting untuk dimusyawarahkan bersama dengan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat setempat.

3. Partisipasi dalam Memanfaatkan dan Memelihara Hasil Pembangunan

Pembangunan desa merupakan bentuk perubahan dan perkembangan yang ditunjukkan oleh masyarakat yang secara sadar dan terencana serta berkelanjutan untuk merubah dari suatu kondisi yang lebih baik dengan melibatkan seluruh masyarakat ditunjang oleh pemerintah dan sumber daya yang ada.

Partisipasi sebagai kekuatan yang dimiliki oleh masyarakat yang memungkinkan kaum yang terpinggirkan secara ekonomi dan politik secara

deliberatif dapat dilibatkan dalam proses pembangunan untuk mengatasi persoalannya di masa kini guna mencapai kehidupan yang lebih baik di masa mendatang.

Sehingga, pembangunan desa yang dimaksud mengarah kepada aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Dari hasil penelitian pada masyarakat suku akit di desa teluk pambang melalui penyebaran angket lapangan menyatakan dari 63 orang yang dijadikan responden atau 100 % masyarakat suku akit desa teluk pambang sepakat menyatakan bahwa pembangunan fasilitas sekolah dapat meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 5.14 berikut :

Tabel 5.14. Tanggapan responden tentang pembangunan sekolah dalam meningkatkan pendidikan masyarakat

No	Kategori	Frekuensi	Persentase (%)
1	Ya	63	100 %
2	Kadang-kadang	-	-
3	Tidak	-	-
Jumlah		63	100 %

Sumber Data : dari lapangan 2013

Tabel diatas mengungkapkan bahwa pembangunan fasilitas sekolah merupakan pembangunan yang efektif bagi masyarakat. Dengan tidak membebankan kepada masyarakat, kondisi ini juga tentunya didukung oleh program pemerintah yang memberikan fasilitas sekolah gratis mulai dari SD/SLTP/SLTA Negeri Sederajat di Desa Teluk Pambang.

Selanjutnya, tanggapan masyarakat pada pembangunan sarana jalan dari 63 orang yang dijadikan responden 100 % masyarakat suku asli desa teluk pambang mendukung pembangunan sarana jalan merupakan pembangunan yang

efektif untuk kelancaran ekonomi masyarakat. Untuk lebih jelas lihat pada tabel 5.15. dibawah ini :

Tabel 5.15. Tanggapan responden tentang pembangunan sarana jalan membantu meningkatkan ekonomi masyarakat.

No	Kategori	Frekuensi	Persentase (%)
1	Ya	63	100 %
2	Kadang-kadang	-	-
3	Tidak	-	-
Jumlah		63	100 %

Sumber Data : dari lapangan 2013

Jalan merupakan penghubung dari satu daerah kedaerah yang lain atau dari satu tempat ketempat yang lain. Keadaan jalan yang baik dapat mempermudah proses transportasi seperti mata pencarian masyarakat suku asli yang dominan menebang kayu bakau tentu membutuhkan sarana jalan yang baik untuk mengeluarkan hasil tebangananya kelokasi penyimpanan/penjualan.

Kemudian, hasil penelitian dilapangan menunjukkan pentingnya sarana olahraga bagi perkembangan masyarakat, yaitu dari 63 orang yang dijadikan responden 100 % masyarakat suku asli desa teluk pambang menyatakan pembangunan sarana olahraga dapat melahirkan perkembangan bagi masyarakat. Untuk lebih jelasnya lihat pada tabel 5.16 dibawah ini :

Tabel 5.16. Tanggapan responden tentang pembangunan sarana olahraga dapat melahirkan perkembangan masyarakat.

No	Kategori	Frekuensi	Persentase (%)
1	Ya	63	100 %
2	Kadang-kadang	-	-
3	Tidak	-	-
Jumlah		63	100 %

Sumber Data : dari lapangan 2013

Data ini dikuatkan lagi melalui wawancara terhadap Bapak Kabit (41) tahun, beliau mengatakan *prestasi pemuda-pemudi masyarakat dalam berolahraga dapat memberikan nilai positif untuk mengharumkan nama komunitas suku asli ini seperti kejuaraan tahun lalu klub sepak bola dan sepak takraw masyarakat suku asli menjadi momok bagi klub-klub lainnya* (Wawancara, Februari : 2013).

Untuk menjaga keutuhan pembangunan tersebut, perlu kiranya kesadaran dari masyarakat untuk saling menjaga dan membenahi pembangunan yang sudah ada. Hasil penelitian dilapangan dengan mekanisme penyebaran angket menunjukkan bahwa dari 63 orang yang dijadikan responden 50 atau 79,37 % dari mereka menyatakan benar bahwa pembangunan yang sudah diselenggarakan merupakan tanggung bersama, kemudian 11 orang atau 17,46 % dari mereka menjawab kadang-kadang, dan hanya 2 orang saja atau 3,18 % dari mereka menjawab tidak. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 5.17 dibawah ini :

Tabel 5.17. Tanggapan responden tentang pembangunan yang sudah diselenggarakan merupakan tanggung jawab bersama.

No	Kategori	Frekuensi	Persentase (%)
1	Benar	50	79,37 %
2	Kadang-kadang	11	17,46 %
3	Tidak	2	3,18 %
Jumlah		63	100 %

Sumber Data : dari lapangan 2013

Dengan menerapkan sifat kepemilikan terhadap pembangunan yang sudah ada, maka masyarakat akan merasa saling memiliki fasilitas tersebut. Hal ini, tentunya harus didukung dengan keikut sertaan masyarakat dalam menjaga keutuhan pembangunan tersebut seperti turut merenovasi jika terjadi kerusakan

pada bangunan tersebut. Dengan begitu, diharapkan fasilitas yang sudah ada bisa digunakan dalam jangka waktu yang lebih lama sehingga pembangunan bisa berlanjut dari tahun ketahun pada kebutuhan masyarakat yang lainnya.

Untuk mengetahui keterlibatan masyarakat suku asli dalam ikut merenovasi pembangunan yang sudah ada dapat dilihat pada tabel 5.18. Dibawah ini :

Tabel 5.18. Tanggapan responden dalam ikut merenovasi pembangunan yang sudah ada.

No	Kategori	Frekuensi	Persentase (%)
1	Ya	54	85.72 %
2	Kadang-kadang	5	7.94 %
3	Tidak	4	6.35 %
Jumlah		63	100 %

Sumber Data : dari lapangan 2013

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa dari 63 orang yang dijadikan responden 54 orang atau 85.72 % dari mereka menyatakan ikut serta dalam merenovasi pembangunan yang sudah ada, 5 orang atau 7.94 % dari mereka menjawab kadang-kadang serta 4 orang atau 6.35 % dari mereka menjawab tidak.

Data diatas menyatakan bahwa partisipasi masyarakat suku asli dalam memelihara hasil pembangunan yang sudah terselenggarakan boleh dikatakan sangat tinggi. Walaupun masyarakat suku asli ini sering disibukkan oleh pekerjaan sehari-seharinya tetapi mereka sangat antusias untuk bekerja sama dalam memelihara dan memperbaiki bangunan yang sudah ada. Seperti perbaikan jembatan yang rusak, jalan, sarana olahraga, rumah ibadah dan lainnya.

Untuk mengetahui rekapitulasi keseluruhan dari ketiga indikator analisis partisipasi masyarakat suku akit dalam mendukung kegiatan pembangunan Desa

Teluk Pambang Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis, dapat dilihat pada tabel

5.19 berikut :

Tabel 5.19. Rekapitulasi Tanggapan Responden Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan

No	Indikator Penelitian	Kategori Jawaban			Jumlah
		Ya/Selalu	Kadang-Kadang	Tidak Pernah	
1.	Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan				
	a. Partisipasi masyarakat dalam menghadiri rapat	28 (44.45%)	33 (52.39%)	2 (3.18%)	63
	b. Keterlibatan masyarakat dalam menyumbangkan pendapat didalam rapat	24 (38.10%)	31 (49.21%)	8 (12.70%)	63
	c. Tanggapan masyarakat tentang pentingnya perencanaan dalam pembangunan	47 (74.61%)	16 (25.40%)	-	63
	d. Keterlibatan masyarakat dalam mendukung kelancaran proses pembangunan	34 (53.96%)	26 (41.27%)	3 (4.77%)	63
	e. Tanggapan masyarakat tentang kebijakan arah pembangunan adalah kepentingan bersama	52 (82.54%)	8 (12.70%)	3 (94.77%)	63

Sumber Data : dari lapangan 2013

Tabel 5.20. Rekapitulasi Tanggapan Responden Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan

No	Indikator Penelitian	Kategori Jawaban			Jumlah
		Ya/Selalu	Kadang-Kadang	Tidak Pernah	
1.	Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan				
	a. Partisipasi masyarakat dalam melakukan gotong royong	48 (76.20%)	11 (17.47%)	4 (6.35%)	63
	b. Partisipasi masyarakat dalam penyaluran dana untuk pembangunan	32 (50.80%)	18 (28.59%)	13 (20.64%)	63
	c. Tanggapan masyarakat tentang berat / tidak dalam menyalurkan dana yang sudah ditetapkan	49 (77.78%)	12 (19.05%)	2 (3.18%)	63
	d. Keterlibatan masyarakat dalam menentukan arah lokasi pembangunan	41 (65.08%)	19 (30.16%)	3 (4.77%)	63
	e. Pernyataan masyarakat tentang lokasi pembangunan yang mengenai lahan tanah yang dimiliki masyarakat	18 (28.58%)	37 (58.74%)	8 (12.70%)	63

Sumber Data : dari lapangan 2013

Tabel 5.21. Rekapitulasi Tanggapan Responden Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Memanfaatkan dan Memelihara Hasil Pembangunan

No	Indikator Penelitian	Kategori Jawaban			Jumlah
		Ya/Selalu	Kadang-Kadang	Tidak Pernah	
1.	Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan				
	a. Pernyataan masyarakat tentang pembangunan sekolah dapat meningkatkan pendidikan masyarakat	63 (100%)	-	-	63
	b. Pernyataan masyarakat tentang pembangunan sarana jalan dapat membantu meningkatkan ekonomi masyarakat	63 (100%)	-	-	63
	c. Pernyataan masyarakat tentang pembangunan sarana olahraga dapat melahirkan perkembangan bagi masyarakat	63 (100%)	-	-	63
	d. Tanggapan masyarakat tentang pembangunan yang sudah ada adalah tanggung jawab bersama	50 (79.37%)	11 (17.46%)	2 (3.18%)	63
	e. Keterlibatan masyarakat dalam merenovasi pembangunan yang rusak	54 (85.72%)	5 (7.94%)	4 (6.35%)	63

Sumber Data : dari lapangan 2013

Tabel 5.22. Rekapitulasi Analisis Partisipasi Masyarakat Suku Akit Dalam Mendukung Kegiatan Pembangunan Desa Teluk Pambang Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis

No	Indikator Penelitian	Kategori Jawaban			Jumlah
		Ya/Selalu	Kadang-Kadang	Tidak Pernah	
1.	Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	185	114	16	315
2.	Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	188	97	30	315
3.	Partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan dan memelihara hasil pembangunan	293	16	6	315
Jumlah		666	227	52	945
Rata-rata		222	75,6	17,4	315
Persentase		70 %	24 %	6 %	100 %

Sumber Data : dari lapangan 2013

Berdasarkan dari tabel diatas, yang merupakan hasil rekapitulasi ketiga indikator Analisis Partisipasi Masyarakat Suku Akit Dalam Mendukung Kegiatan Pembangunan Desa Teluk Pambang Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis (Tentang partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan serta partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan dan memelihara hasil pembangunan).

Dari 63 orang yang dijadikan responden dapat dilakukan perincian sebagai berikut :

1. Responden partisipasi masyarakat suku asli terhadap pembangunan desa teluk pambang kecamatan kabupaten bengkalis yang memberikan tanggapan “Ya” persentase sebesar 70 %.

2. Responden partisipasi masyarakat suku asli terhadap pembangunan desa teluk pambang kecamatan kabupaten bengkalis yang memberikan tanggapan “Kadang-kadang” persentase sebesar 24 %.
3. Responden partisipasi masyarakat suku asli terhadap pembangunan desa teluk pambang kecamatan kabupaten bengkalis yang memberikan tanggapan “Tidak Pernah” persentase sebesar 6 %.

Dilihat dari hasil perincian rekapitulasi diatas peneliti mengambil kesimpulan bahwa Analisis Partisipasi Masyarakat Suku Akit/Asli Dalam Mendukung Kegiatan Pembangunan Desa Teluk Pambang Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis dapat dikategorikan tergolong “Tinggi”. Hal ini, terlihat dari hasil penelitian dilapangan berdasarkan persentase jawaban responden terhadap ketiga indikator yaitu tentang partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan serta partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan dan memelihara hasil pembangunan, berjumlah sebesar 70 %.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai hasil akhir dari penelitian tentang Analisis Partisipasi Masyarakat Suku Akit Dalam Kegiatan Pembangunan Desa Teluk Pambang Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

Dalam kemajemukan bangsa Indonesia, suku akit sering disebut sebagai suku bangsa terasing, mereka umumnya bermukim dalam wilayah yang sangat terpencil dengan cara hidup yang masih tradisional. Tingkat pendidikan masyarakat suku akit ini rata-rata masih tergolong rendah yaitu mayoritas dari mereka tidak sekolah dan hanya tamatan SD. Tingkat ekonominya juga masih tergolong pas-pasan. Namun, masyarakat suku akit desa teluk pambang termasuk orang yang berprestasi dalam bidang seni dan olahraga.

Kelambanan dan kurang berhasilnya program pembinaan komunitas masyarakat suku akit ini pada umumnya, bukanlah semata-mata karena keterbatasan dana, data, dan tenaga trampil, melainkan juga karena belum ditemukannya rancangan program pembinaan yang terarah dan teruji sesuai dengan konsep sosial budaya Masyarakat Suku Akit itu sendiri.

Adapun, yang menjadi faktor-faktor penghambat dan pendukung partisipasi masyarakat suku akit dalam kegiatan pembangunan yaitu :

➤ Faktor Ekonomi

Bahwa kesibukan masyarakat suku asli dalam memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari menjadi faktor penghambat masyarakat suku asli untuk berpartisipasi aktif dalam menghadiri rapat dan melakukan gotong royong massal serta rendahnya penghasilan masyarakat suku asli menyebabkan masyarakat merasa keberatan untuk berpartisipasi aktif dalam penyaluran dana pembangunan.

➤ Faktor Pendidikan

Berpengaruh pada keterampilan berbicara ditengah musyawarah serta ketidak tahuan masyarakat tentang persoalan desa membuat mereka fakum dan hanya menerima hasil keputusan dari atas.

➤ Faktor Sosial Budaya

Kurangnya komunikasi dengan masyarakat luar berpengaruh pada lambannya perkembangan suatu masyarakat.

Adapun yang menjadi faktor-faktor pendukung partisipasi masyarakat suku akit adalah :

➤ Adanya Rasa Solidaritas dan Integritas Sosial Masyarakat

Yaitu kebersamaan dan persatuan masyarakat dalam membangun fasilitas-fasilitas yang rusak seperti fasilitas jembatan yang menjadi laluan aktifitas perekonomian masyarakat suku akit ini.

➤ Kemauan dan Kemampuan untuk Mengubah atau Memperbaiki Keadaan dan Membangun atas Kekuatan Sendiri

Yaitu dorongan masyarakat suku akit untuk menjaga nama baik komunitasnya melalui bidang olahraga serta budaya.

➤ **Pengaruh Masyarakat Luar**

Yaitu sikap masyarakat untuk melakukan perubahan-perubahan sosial yang disebabkan oleh pengaruh lingkungan sekitar seperti teman sebaya.

B. Saran

Setelah ditarik kesimpulan tentang Analisis Partisipasi Masyarakat Suku Akit Dalam Kegiatan Pembangunan Desa Teluk Pambanng Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis. Maka perlu kiranya penulis memberikan saran sebagai bahan masukan untuk meningkatkan lagi kualitas dan kuantitas pelaksanaan program pembangunan di Desa Teluk Pambang :

Masyarakat suku akit sebagai penggerak pembangunan didesanya sendiri, hendaknya sadar bahwa pendidikan itu sangat penting untuk kehidupan dimasa akan datang supaya mampu untuk bersikap aktif dalam berbagai tindak partisipasi baik dalam perencanaan, pelaksanaan hingga penggunaan dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan. Disamping itu, masyarakat juga dituntut untuk saling terbuka dalam menjalin komunikasi dengan masyarakat luar supaya dapat melakukan perbandingan dalam setiap perkembangan yang terjadi.

Pemerintah desa sebagai administrator pembangunan yang mengerti dan memahami tugas serta fungsinya diharapkan mampu untuk memberi pencerahan tentang pentingnya pendidikan serta komunikasi pada dunia luar, membuka wawasan kepada masyarakat, membantu dalam penyaluran dana / penyediaan material baik untuk kepentingan pendidikan maupun pembangunan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifuddin. 2010. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Bandung : Alfabeta
- Budiarjo, Mariam. 1998. *Partisipasi dan Partai Politik*, Jakarta; Gramedia
- Budi, Brata Kusuma. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama
- Conyers, Diana. 1991. *Perencanaan Sosial di Dunia ketiga*. Yogyakarta: UGM Press.
- Diamar, Son Dkk. 2004. *Pengutamaan Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan*. Jakarta. CV. Cipruy
- Hamin, Sufian. 2003. *Sistem Perencanaan Strategis dalam Pembangunan*. Pekanbaru : UIR PREES
- Holil, Soelaiman. 1980. *Partisipasi Sosial dalam Usaha Kesejahteraan Sosial*. Bandung
- Mikkelsen, Britha. 1999. *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-upaya Pemberdayaan: sebuah buku pegangan bagi para praktisi lapangan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Ndaraha, Taliziduhu. 2000. *Pembangunan Masyarakat*. Jakarta: Rineka Cipta
- Nugroho dan dahuri. 2003. *Reinventing Pembangunan*. Jakarta : PT. Elex Media Computindo Kelompok Gramedia
- Nurhidayat. 2005. *Otonomi Daerah, Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah*. Bandung : CV. Nuansa Aulia
- Ruslan, Rasady. 2003. *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Sundria, Munawar Haryono. 2002. *Pengantar Studi Administrasi Pembangunan*. Bandung : Bandar Maju
- Sundria, Munawar Haryono. 2006. *Kepemimpinan, Peran serta dan Produktivitas*. Bandung : Bandar Maju
- Siagian, Sondang P. 2000. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Sugiono, 2005. *Metode Penelitian Administrasi Negara*, CV. Alfabeta: Bandung

Syani, Abdul. 2002. *Sosiologi Sistemika, Teori dan Terapan*, Jakarta: PT. Bumi Aksara

Usman Husaini, dkk. 2009. *Metodologi npenelitian sosial*. Jakarta. PT. Bumi Aksara

Widarta. 2001. *Cara Mudah Memahami Otonomi Daerah*. Jakarta : Larela Pustaka Utama

Widjaja, Haw. 2005. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*, Jakarta, PT. Grafindo Persada

Rujukan :

Arniati, *Analisis Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Desa Lubuk Madian Gajah Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan*. Skripsi Sarjana Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru 2009

Hasbi, Analisis partisipasi masyarakat dalam pembangunan kecamatan merbau kabupaten kepulauan meranti. Skripsi Sarjana Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru 2011

Peraturan Desa Teluk Pambang Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis Tahun 2011.